



Strategi Taktis dalam Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Secara Komprehensif di Kabupaten Sleman

Disusun oleh:

Tim Riset

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman

(Eko Priyo Agus Nugroho (koordinator), Supadiyanto (editor),
Ery Widaryana, Arif Bintoro Johan, Joko Sutikno, Ariyanto Nugroho,
Marietta D. Susilawati, Sri Lestari, Sutarta, Galuh Setia Winahyu, dan
Syaeful Cahyadi)

**Dewan Pendidikan
Kabupaten Sleman
2025**

Hasil Penelitian

STRATEGI TAKTIS DALAM PEMERATAAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SECARA KOMPREHENSIF DI KABUPATEN SLEMAN



Penyusun

Tim Riset Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman:

Eko Priyo Agus Nugroho (Koordinator), Supadiyanto (Editor), Ery Widaryana, Arif Bintoro Johan, Joko Sutikno, Ariyanto Nugroho, Marietta D. Susilawati, Sri Lestari, Sutarta, Galuh Setia Winahyu, dan Syaeful Cahyadi

DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

Implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) pada berbagai sekolah di Kabupaten Sleman menghadapi banyak tantangan dan kendala. Perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika (Telematika) berjalan sangat pesat saat ini penting menjadi bahan perhatian bersama, berhubungan dengan implementasi kurikulum tersebut. Selain para pemegang kebijakan dalam bidang pendidikan (menteri, DPR RI, kepala dinas, DPRD, Dewan Pendidikan); eksistensi kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, pelajar/murid, dan orangtua/wali murid menjadi pihak-pihak yang sangat berpengaruh terhadap capaian mutu pendidikan. Pada aspek lain, ada 8 standar nasional pendidikan yang wajib dipenuhi (dan kalau bisa melampaui nilai standar tersebut) oleh setiap lembaga pendidikan agar berkualitas unggul. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Ada dua rumusan masalah yang menjadi lokus kajian dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana strategi dalam pengimplementasian kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) pada berbagai SD dan SMP se-Kabupaten Sleman sehingga dapat meningkatkan dan pemeratakan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman? Kedua, bagaimana efektivitas kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, peran orangtua, serta peran implementasi pendekatan pembelajaran mendalam terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Sleman?

Paradigma penelitian ini adalah kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif (*mix method*). Teknik pengumpulan data melalui: kuesioner, kajian pustaka, dokumentasi, observasi, dan wawancara terpandu atau *Focus Group Discussion* (FGD). Ada dua jenis data yang diolah dalam riset ini yakni data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan selama 5 bulan sejak Agustus sampai Desember 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SD dan SMP se-Kabupaten Sleman di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Jumlah sekolah yang dijadikan sampel riset sebanyak 262 SD dan SMP se-Kabupaten Sleman. Terdiri dari 214 SD dan 48 SMP, 262 guru, 448 orangtua, 448 siswa. Jumlah responden yang sudah mengisi kuisisioner sebanyak 204 kepala sekolah, 374 guru, 1.045 guru, dan 1.263 pelajar. Narasumber utama yang digunakan sebanyak 32 orang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan jajarannya, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, Tenaga Ahli Bupati Sleman Bidang Pendidikan, para kepala sekolah, para guru, para pengawas, dan pengurus komite sekolah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) pada 12 Kapanewon se-Kabupaten Sleman.

Analisis data dilakukan dengan olah data statistik *Smart PLS* serta dikombinasi dengan analisis model Bagan Alir *Miles and Huberman*. Aplikasi olah data statistik *Smart PLS* digunakan untuk menghitung pengaruh variabel: model kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, peran orangtua, serta implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Olah data model Bagan Alir versi *Miles and Huberman* digunakan untuk menganalisis data diskriptif (berupa pengalaman maupun pengetahuan) dari para narasumber berhubungan dengan strategi

yang digunakan masing-masing pihak dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman sekaligus permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Pertama, model kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, peran aktif orangtua, dan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam memiliki pengaruh sangat signifikan secara serentak (bersama-sama/simultan) terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Model kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif, kreatif, dan progresif; serta peran kompetensi guru yang memiliki 4 kompetensi utama (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian) memiliki pengaruh yang paling besar jika dikomparasikan dengan pengaruh faktor lainnya.

Kedua, strategi taktis yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman dilakukan dengan berbagai strategi. DPRD Kabupaten Sleman memberikan dukungan pendanaan rata-rata dalam jumlah Rp 900 miliar kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman per tahun. Anggaran tersebut sebagian besar terserap untuk pembiayaan gaji pegawai. Anggaran yang diplot DPRD Kabupaten Sleman untuk dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memang sudah terbilang besar jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kabupaten Sleman. Meski sudah besar, angka di atas belum sesuai mandatori Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1, di mana dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara intensif telah melakukan pendampingan, sosialisasi, dan bimbingan teknis implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam kepada para kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Namun efektivitas program pendampingan, sosialisasi, dan bimbingan teknis tersebut sampai sekarang belum optimal. Karena masih terdapat kepala sekolah, guru, termasuk orangtua yang belum memahami dengan baik dan benar esensi dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Dinas Pendidikan harus membuat terobosan inovatif dan kreatif untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam tersebut ke seluruh stakeholder melalui beragam cara dan media. Dinas Pendidikan dan DPRD Kabupaten Sleman telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan kesejahteraan guru di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman sudah berusaha untuk pemerataan mutu pendidikan dengan upaya menghilangkan adanya sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Langkah ini untuk memberikan perlakuan sama dan adil kepada semua sekolah sehingga mutu pendidikan bisa merata dan semakin baik. Sinergisitas (kerjasama, komunikasi, dan koordinasi) sudah baik dilakukan antara DPRD Kabupaten Sleman melalui Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, Bupati Sleman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, orangtua murid, dan pihak-pihak lainnya.

Para kepala sekolah sebagai pemimpin pada satuan pendidikan masing-masing sudah memberikan keteladanan kepemimpinan yang baik dalam pengimplementasian kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Mereka sangat aktif dalam memberikan apresiasi kepada para guru termasuk pelajar yang berprestasi. Para kepala sekolah juga giat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan para orangtua/wali dan lembaga luar untuk

meningkatkan mutu sekolahnya masing-masing. Hanya saja pada tingkat SD, ditemukan banyak guru yang tidak tertarik/minat menjadi kepala sekolah. Akibatnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman cukup kesulitan untuk mencari pengganti kepala sekolah yang sudah masuk usia pensiun. Untuk itu perlu strategi agar jabatan kepala sekolah menjadi impian bagi karir para guru ke depan.

Para guru, pengawas sekolah, dan orangtua/wali murid (melalui komite sekolah) telah berperan aktif dalam berkontribusi meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai upaya meningkatkan kompetensi guru profesional, pengawas sekolah intensif melakukan supervisi ke berbagai sekolah sehingga menjadi sekolah unggul. Para orangtua melalui komite sekolah telah membentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) baik pada tingkat kapanewon dan kabupaten yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan kerjasama antar orangtua murid untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman.

Ada tiga model rekomendasi dari riset ini. Pertama, saran birokratis/praktis. Saran ini ditujukan kepada Bupati Sleman selaku pemangku kepentingan tertinggi di Kabupaten Sleman. Riset ini menghasilkan kesimpulan penting berhubungan dengan masa depan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Bahwa pemahaman utuh mengenai esensi dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam belum dikuasai sepenuhnya oleh para kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan para orangtua/pengurus komite sekolah. Untuk itu seluruh kepala sekolah dan guru wajib terlebih dahulu memahami dengan baik esensi pokok dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Perlu berbagai program dan inovasi yang bisa digagas oleh Bupati Sleman agar implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam tersebut bisa berjalan dengan baik. Riset ini merupakan bagian tak terpisahkan dari monitoring (pengawasan) dan “evaluasi” atas pelaksanaan dari kurikulum tersebut, di mana mengingat pelaksanaan kurikulum tersebut masih dalam tahap awal di Kabupaten Sleman. Program yang relevan untuk digagas pada tahun mendatang yakni pemberian penghargaan kepada para kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan komite sekolah yang berprestasi dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam tersebut. Usulan tim riset, penghargaan terhadap berbagai kalangan yang berprestasi luar biasa dan punya kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Sleman bisa diprakarsai oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam program “Dewan Pendidikan Award”--yang bisa dilakukan setiap akhir tahun.

Bupati Sleman juga harus menjamin mengenai ketersediaan dan keterpenuhan anggaran pendidikan agar sesuai dengan mandatori dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1. Adanya rencana rasionalisasi Anggaran Raperda Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2026 Pasca Penurunan Dana Transfer Daerah yang tercantum dalam RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sampai lebih dari Rp 65 miliar (sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor: 910/13822 tentang Penjelasan Rasionalisasi RKA 2026 per 28 Oktober 2025); sebaiknya harus ditinjau ulang. Karena tim riset Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman meyakini jika rasionalisasi anggaran kembali terjadi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada tahun 2026; bahkan sampai mengeprag pagu anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Sosial (BANSOS) PAUD, SD, dan SMP, PKBM Tahun 2026, dapat dipastikan mutu pelayanan publik bidang pendidikan akan terganggu dan berpotensi menurunkan kualitas/mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Padahal tantangan zaman dan masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sleman

semakin kompleks dan membutuhkan program kerja inovatif, kreatif, dan pengawalan yang ekstra ketat.

Saran/rekomendasi birokratis kedua ditujukan kepada DPRD Kabupaten Sleman agar selalu memprioritaskan bidang pendidikan dalam membangun “*master plan*” Kabupaten Sleman tahun 2045. Bidang pendidikan merupakan entitas dari upaya pemerintah untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset utama Kabupaten Sleman yang menjadi motor penggerak dalam berbagai bidang kehidupan. Pemberian kepastian “politik anggaran” yang memadai kepada Dinas Pendidikan. Selain itu juga memperkuat eksistensi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dengan cara penguatan anggaran yang memadai; serta memberikan dukungan hukum agar Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman benar-benar bisa mandiri baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun kewenangannya.

Saran/rekomendasi birokratis ketiga ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman agar optimal dan komitmen dalam pemerataan mutu pendidikan pada sekolah-sekolah yang masih minim sarana dan prasarana. Nasib kesejahteraan guru baik PTK formal maupun non formal berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman harus berjuang keras untuk menjamin kesejahteraan setiap guru (formal maupun non formal, negeri maupun swasta). Mengingat masih banyak guru yang gajinya di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR), Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dapat berinisiatif membuat program-program terus meningkatkan profesionalitas guru sekaligus kesejahteraan hidup mereka.

Kedua, saran akademis/teoritis. Tim riset menyarankan agar hasil riset ini dapat memberikan dampak optimal terhadap pengembangan teori pada bidang ilmu pendidikan (khususnya pada manajemen/tata kelola kurikulum dan sumber daya manusia untuk pendidikan unggul); maka tim riset menyarankan agar ada penelitian lanjutan dari riset ini. Adapun celah riset yang bisa dieksplorasi peneliti lainnya yakni berhubungan dengan isu evaluasi pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam minimal setelah 1 tahun ajaran penuh pada tahun 2026. Evaluasi kurikulum, sebaiknya juga dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali untuk dapat memperbaiki pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam tersebut. Peluang isu lain yang bisa dilakukan riset lanjutan yakni berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia (SDM) kepala sekolah dan guru. Berbagai hambatan, tantangan, dan penyebab adanya tren mengapa banyak guru di Kabupaten Sleman yang tidak berminat menjadi kepala sekolah, relevan untuk dicari penyebab utamanya. Yang perlu diriset selanjutnya yakni berhubungan dengan standar biaya minimal yang dibutuhkan oleh pelajar SD dan SMP di Kabupaten Sleman sejak masuk sekolah sampai lulus dengan kualitas unggul. Melalui berbagai rencana riset lanjutan tersebut akan sangat bermanfaat dalam membantu berbagai pihak (mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Sleman, kepala sekolah, guru, dan pihak-pihak lainnya) dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dengan baik dari hulu sampai hilir berhubungan dengan tata kelola dan strategi membangun arsitektur pendidikan yang ideal di Kabupaten Sleman.

Ketiga, rekomendasi/saran secara sosial kemasyarakatan, tim riset ini menyarankan agar para orangtua/wali murid, masyarakat, maupun publik memiliki kesadaran tinggi untuk berkontribusi dalam menyukseskan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Hal ini sangat penting dilakukan karena banyak masyarakat yang selama ini bersikap “apatis” dengan adanya perubahan kurikulum yang terjadi secara berkala ketika terjadi pergantian kekuasaan (pergantian menteri). Peran masyarakat dalam ekosistem pendidikan model oktahelik sangat penting sebab menjadi pihak yang mempengaruhi kuat ke manakah anak-anak mereka akan

melanjutkan sekolah. Masyarakat juga seharusnya memiliki sikap kritis terhadap para pemegang kebijakan bidang pendidikan mulai dari Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Masyarakat juga harus kritis terhadap para pengurus komite sekolah dan juga Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota maupun provinsi. Sikap kritis tersebut penting dipelihara untuk menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan; sehingga setiap kritik yang dilancarkan masyarakat dapat memperbaiki tata kelola pendidikan secara umum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam pembangunan daerah berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sistem pendidikannya. Kabupaten Sleman sebagai pusat pertumbuhan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai daerah penyangga pendidikan di DIY, tetapi juga sebagai rujukan bagi kabupaten/kota lain dalam hal inovasi dan pengelolaan pendidikan. Namun demikian, di tengah perkembangan global yang sangat dinamis, Sleman menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan yang mampu menjawab tuntutan Abad XXI (World Bank, 2021).

Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan capaian akademik siswa, tetapi juga menyangkut bagaimana pendidikan mampu membentuk kompetensi berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, serta karakter yang berintegritas. Pergeseran paradigma pendidikan dari sekadar *transfer of knowledge* menuju *deep learning* (pembelajaran mendalam) menjadi sebuah keniscayaan (Fullan, Quinn, & McEachen, 2018; Darling-Hammond dkk., 2020). Model pendidikan yang hanya menekankan pada hafalan tidak lagi memadai untuk mempersiapkan generasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi, sosial, dan budaya. Dibutuhkan strategi peningkatan mutu yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan melibatkan seluruh ekosistem pendidikan (Schleicher, 2019).

Berhubungan dengan masalah dunia pendidikan di Kabupaten Sleman, ada 7 masalah serius. Pertama, tidak meratanya fasilitas dan infrastruktur pendidikan pada 17 kapanewon dan 86 kalurahan di Kabupaten Sleman yang berpotensi menimbulkan adanya kesenjangan sosial dan kesenjangan mutu pendidikan di berbagai sekolah di Kabupaten Sleman. Fasilitas dan infrastruktur ini bisa ditinjau dari sisi struktur bangunan maupun dari aspek fasilitas pendidikan seperti internet, komputer/laptop, laboratorium terpadu, dan sarana pendukung lainnya.

Kedua, masalah terkait kesejahteraan hidup dari para guru di Kabupaten Sleman baik guru negeri maupun swasta. Banyak guru tetap di berbagai yayasan sekolah swasta di Sleman yang gajinya jauh di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sleman. Tentu saja

hal ini dapat berpengaruh pada profesionalitas para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

Ketiga, banyaknya kasus anak tidak sekolah yang dipicu beragam faktor. Penyebabnya yaitu permasalahan pola pikir, sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi kehidupan anak-anak tersebut. Anak tidak sekolah meliputi tiga kategori yakni: anak putus sekolah; anak lulus SD/SMP sederajat tapi tidak melanjutkan SMP/SMA sederajat; serta anak yang sama sekali belum pernah sekolah. Merujuk pada data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (2023), jumlah keseluruhan anak tidak sekolah yang masuk rentang usia 7-18 tahun berdasarkan kegiatan pendataan di bawah koordinasi Satuan Petugas Anak Putus Sekolah terdapat sejumlah 436 anak, di mana 330 di antaranya laki-laki dan 106 perempuan.

Keempat, masalah kualitas guru dari sisi profesionalisme masih di bawah 80 persen. Bahkan kualitas guru ASN yang telah memiliki ijazah S1 dan bersertifikat pendidik baru mencapai 76,26 persen saja. Kelima, adanya stagnansi kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SD, serta penurunan kemampuan literasi dan stagnansi numerasi peserta didik SMP pada tahun 2022 dibandingkan pencapaian tahun 2021. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan capaian Kabupaten/Kota serupa di tingkat nasional mengalami rata-rata kenaikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SD dan SMP. Hal ini mengindikasikan masih perlunya penguatan kompetensi mengajar literasi dan numerasi bagi guru SD dan SMP agar kompetensi guru meningkat dan mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik SD dan SMP.

Keenam, masalah adanya tren penurunan jumlah peserta didik di Kabupaten Sleman. Hal ini terjadi pada lembaga pendidikan negeri dan swasta. Apalagi letak antar sekolah di Kabupaten Sleman relatif saling berdekatan. Mengingat wilayah Kabupaten Sleman hanya terdiri dari 17 kapanewon. Ketujuh, implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang menjadi kebijakan baru di Indonesia termasuk di Kabupaten Sleman masih menjadi kebijakan yang tereksekusi dengan baik dan benar. Mengingat, pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) membutuhkan kesadaran dari berbagai pihak untuk melakukan pendidikan dengan penuh kesadaran (*mind ful*), menyenangkan (*joy ful*), dan penuh makna (*meaning ful*).

Tujuh masalah utama yang menerpa dunia pendidikan di Kabupaten Sleman tersebut dapat dituntaskan melalui transformasi, digitalisasi, dan sinergisitas dunia pendidikan model *oktahelix*. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam sinergisitas model *oktahelix* ini berbagai sekolah di

Kabupaten Sleman harus bersinergi dengan 8 pihak sekaligus yaitu birokrasi/pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dunia industri, perguruan tinggi. Pihak lainnya yang harus digandeng yaitu media, LSM, komunitas, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah, serta jaringan atau kekuatan Internasional (Supadiyanto, 2025).

Terlepas dari tujuh masalah krusial di atas, peran berbagai aktor pendidikan menjadi sangat penting dalam memajukan dunia pendidikan. Guru selalu dituntut memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian yang mumpuni untuk mewujudkan pembelajaran bermakna (Prastyo dan Sumarni, 2020; OECD, 2021). Kepala sekolah sendiri juga harus menjadi pemimpin transformatif yang mampu menggerakkan budaya mutu di satuan pendidikan (Bush dan Ng, 2019). Orang tua perlu hadir sebagai mitra sekolah dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak (Hornby dan Blackwell, 2018). Pemerintah daerah melalui kebijakan dan program strategis harus memastikan adanya dukungan regulasi, anggaran, serta sarana-prasarana pendidikan yang memadai (Kemendikbudristek, 2022).

Di sisi lain, diperlukan pula instrumen evaluasi yang obyektif, sistematis, dan berkesinambungan untuk memetakan kualitas input, proses, maupun output pendidikan. Tes Kemampuan Akademik (TKA) dinilai dapat berperan sebagai alat diagnosis untuk mengetahui capaian dasar siswa, sehingga sekolah maupun pemerintah dapat merancang intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan (Utami, 2021; Hidayat dan Sulisty, 2019). Dengan demikian, TKA bukan hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian, tetapi juga menjadi basis data untuk penyusunan kebijakan pendidikan berbasis bukti/*evidence-based policy* (Levin, 2017).

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki tanggung jawab strategis untuk memberikan rekomendasi strategis kepada Bupati Kabupaten Sleman dalam rangka merumuskan kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada upaya peningkatan, pemertahanan, dan pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman menjadi penting dilakukan di masa kini dan yang akan datang.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 3 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan mencakup 8 aspek. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. 8 Standar Nasional Pendidikan tersebut sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum yang menjadi “*blue print*” dari setiap kurikulum yang berlaku di Indonesia. Lembaga

pendidikan dengan kualitas unggul berarti sudah mencapai 8 Standar Nasional Pendidikan tersebut, bahkan bisa melampauinya.

Masih minimnya penelitian yang mengeksplorasi mengenai evaluasi tiap standar pendidikan nasional, menjadi celah dan peluang bagi para peneliti untuk berlomba-lomba merisetnya. Penelitian ini diharapkan secara khusus mampu memproyeksikan berbagai strategi taktis dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman melalui implementasi berbagai optimalisasi peran para aktor pendidikan dan dukungan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat dalam menyempurnakan ekosistem pendidikan yang bermutu unggul, adil, dan merata di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini juga ditargetkan dapat menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pendidikan di Sleman sekaligus merumuskan strategi komprehensif untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Yamin & Syahrir, 2020). Adanya kebijakan baru dalam penerapakan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam secara nasional tentu membawa konsekuensi logis terhadap berbagai perubahan tata kelola dan kebijakan pendidikan baik berskala nasional, regional, dan lokal/daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Ada dua rumusan masalah yang menjadi lokus kajian dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana strategi dalam pengimplementasian kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) pada berbagai SD dan SMP se-Kabupaten Sleman sehingga dapat meningkatkan dan pemeratakan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman? Kedua, bagaimana efektivitas kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, peran orangtua, serta peran implementasi pendekatan pembelajaran mendalam terhadap pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dua tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

- Untuk menghasilkan formulasi strategi dalam implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) pada berbagai SD dan SMP se-Kabupaten Sleman sehingga dapat meningkatkan dan pemeratakan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman.

- Untuk mengukur besarnya dampak atau efektivitas kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, peran orangtua, serta peran implementasi pendekatan pembelajaran mendalam terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman.

1.3 Manfaat Penelitian

Ada tiga model manfaat/signifikansi penelitian ini yaitu manfaat praktis, manfaat akademis, dan manfaat sosial.

Pertama, manfaat praktis. Penelitian ini bermanfaat bagi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dalam menghasilkan rekomendasi bagi Bupati Sleman berhubungan dengan tata kelola dan kebijakan pendidikan di Kabupaten Sleman. Adanya penerapan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam membutuhkan kajian intensif terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta pengendaliannya. Tanpa melalui tahapan tersebut, kebijakan baru yang dijalankan akan kontraproduktif dan sulit dinilai efektivitasnya terhadap mutu pendidikan. Secara praktis, hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi birokrasi khususnya para pemegang kebijakan dunia pendidikan (Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Pengawas, dan *stakeholders* lainnya) sebagai bahan pertimbangan dan kajian komprehensif. Hasil riset ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Sleman saja; substansi rekomendasinya ke depan bisa dikembangkan juga pada kabupaten/kota lain di Indonesia.

Kedua, manfaat akademis/teoritis. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan, Khususnya dalam teori manajemen pembelajaran dan tata kelola pendidikan modern. Bahwa dunia pendidikan merupakan ekosistem dari peradaban manusia melalui filosofi pembelajaran sepanjang hayat. Hasil riset ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi terhadap temuan baru dalam bidang keilmuan bidang pendidikan sehingga bisa dimanfaatkan para akademisi dan peneliti untuk terus menemukan berbagai inovasi kebijakan dalam bidang pendidikan.

Ketiga, manfaat sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan memahami berbagai kebijakan dalam dunia pendidikan, masyarakat akan semakin menyadari dan memiliki komitmen serta kepedulian tinggi dalam ikut terlibat aktif dalam upaya meningkatkan dan pemeratakan mutu pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendampingi para peserta didik ketika bersama keluarga dan di lingkungan

masyarakat; sehingga tercipta relasi harmonis yang mendukung terciptanya atmosfer pendidikan yang kondusif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Ekstraksi Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, didapatkan hasil menarik sebagaimana disajikan di bawah ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Kharisma, Diva Erlina Septiani, dkk. (2025) dengan paradigma kualitatif menemukan bahwa pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual, motivasi belajar, dan karakter siswa. Adapun masalah dan kendala yang dialami dalam menjalankan pembelajaran mendalam yaitu adanya keterbatasan pemahaman guru, kurangnya sumber daya manusia, dan tantangan dalam asesmen pembelajaran. Untuk menjalankan pembelajaran mendalam dibutuhkan berbagai dukungan utama berupa keterampilan guru dalam menjalankan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam, inovasi kurikulum yang berkelanjutan, dan sistem regulasi yang kondusif.

Kedua, penelitian milik I Ketut Suar Adnyana (2024) menyatakan bahwa metode pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bisa tepat digunakan dengan cara memilih metode pembelajaran berbasis masalah riil, pembelajaran berbasis proyek, dan inkuiri, serta dengan model *flipped classroom*. Melalui model tersebut, siswa dapat memahami dengan baik mata pelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan target dan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan.

Ketiga, penelitian yang digagas oleh Suwandi, Riska Putri, dan Sulastri (2024) mengungkapkan bahwa pembelajaran mendalam terbukti mampu berkontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis, partisipasi aktif, dan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam praktiknya, pembelajaran mendalam membutuhkan kehadiran guru yang terampil; maka program pelatihan bagi pendidik menjadi sangat strategis sebagai andalan; dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung adanya kegiatan pembelajaran yang kondusif.

Keempat, penelitian yang diprakarsai oleh Andi Nur Isnayanti, Putriwanti, Kasmawati, Rahmita (2025) menyimpulkan bahwa pembelajaran mendalam dapat meningkatkan keterlibatan

siswa, memperkuat pemahaman materi, dan mendorong pembentukan pola pikir kritis serta kreatif. Selain itu, pendekatan ini dapat didukung melalui pelatihan guru yang berkelanjutan, penerapan teknologi pendidikan, serta kebijakan yang fleksibel dan inovatif. Dengan kolaborasi antara pendidik, institusi pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya, pembelajaran mendalam dapat menjadi katalisator, transformasi pendidikan yang lebih adaptif dan relevan. Karena itu, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengatasi hambatan yang ada dan memaksimalkan potensi pembelajaran mendalam guna menciptakan lulusan yang kompeten serta siap menghadapi persaingan global.

Kelima, penelitian milik Alya Fitriani dan Santiani (2025) berhubungan dengan pembelajaran mendalam menghasilkan kesimpulan riset menarik bahwa pembelajaran mendalam berpotensi dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sebab menghasilkan lulusan dengan daya saing tinggi. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui model pembelajaran yang membuat para peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan berorientasi pada penemuan solusi yang komprehensif.

Keenam, riset yang dilakukan oleh Yeni Nuraeni, Al Ghifari, Alicia Ivanna, dan Alya Atsa, Radita Maharani (2025) mengungkapkan bahwa peran guru dalam pembelajaran mendalam berkontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis, partisipasi aktif, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Paradigma penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif.

Ketujuh, penelitian yang digagas oleh Chika Rahayu, Hanifah Zakiya, Ryna Aulia Falamy, Muhammad Ubaidillah, Yanuar Dwi Prastyo, Lintang Fitra Utami, serta Desrina Hardianti, dan Rani Yosilia (2025) menunjukkan bahwa adanya sosialisasi melalui webinar terhadap pendekatan pembelajaran mendalam yang diikuti para guru dapat menanamkan persepsi peserta terhadap pemahaman *deep learning* berubah menjadi sebuah pendekatan pembelajaran, bukan sebuah kurikulum baru.

Kedelapan, penelitian Khairul Amri dan Fitri Adifa (2025) mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa, refleksi, serta penguatan asesmen otentik. Ke depan perlu adanya pemetaan sistematis atas tantangan dan solusi kontekstual penerapan pembelajaran mendalam di Indonesia.

Dari delapan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam dinilai bermanfaat positif baik bagi para pelajar maupun para guru

dalam menghidupkan kegiatan belajar mengajar yang interaktif, kritis, inovatif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Namun belum ada riset yang mengeksplorasi mengenai bagaimana strategi dalam pengimplementasian kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) pada berbagai SD dan SMP se-Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu juga belum ada riset sebelumnya yang mengeksplorasi mengenai seberapa besar efektivitas peran guru, peran kepala sekolah, peran orangtua, serta peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Dua domain riset tersebut yang akan dieksplorasi dalam riset ini dan menjadi noveltinnya.

2.2. Pendekatan Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*)

Perubahan paradigma pendidikan abad XXI menuntut adanya pergeseran dari pendekatan pembelajaran tradisional menuju *deep learning*. Pendekatan kurikulum ini menekankan bukan hanya pada penguasaan pengetahuan faktual, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan literasi digital (Fullan & Langworthy, 2014).

Implementasi kurikulum berbasis *deep learning* diharapkan mampu membentuk peserta didik yang adaptif terhadap perubahan global serta memiliki kecakapan hidup yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Dalam konteks Kabupaten Sleman yang memiliki keragaman sosial, ekonomi, dan budaya, pendekatan kurikulum *deep learning* relevan untuk mendorong pembelajaran bermakna dan kontekstual, sehingga peserta didik tidak hanya cakap akademik tetapi juga berkarakter.

Sejumlah negara di dunia telah berhasil mengintegrasikan pendekatan pembelajaran mendalam, baik secara eksplisit maupun implisit secara sistematis dalam kurikulum nasional mereka. Di negara Norwegia, pendekatan pembelajaran mendalam sebagai kerangka kerja kurikulum yang menerapkan materi esensial, pendekatan lintas disiplin dan interdisiplin dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Negara Finlandia, Australia dan Inggris juga telah menerapkan prinsip pembelajaran mendalam melalui bentuk pembelajaran yang bermakna, menggembirakan dan penuh kesadaran (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025).

2.3 Kompetensi Guru

Guru merupakan aktor utama dalam menentukan mutu pendidikan karena berada pada garis depan proses pembelajaran. Kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian guru (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005) sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum *deep learning*.

Guru yang berkualitas tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, menerapkan strategi *student-centered learning*, serta membangun iklim kelas yang inklusif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penguatan kompetensi guru berbanding lurus dengan peningkatan capaian akademik siswa (Darling-Hammond, 2017). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, supervisi, dan komunitas belajar sangat relevan untuk mendukung mutu pendidikan di Sleman.

2.4 Model Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya mutu di sekolah. Kepemimpinan yang transformatif, menurut Leithwood & Jantzi (2006), mampu mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk berinovasi, bekerja kolaboratif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas belajar siswa.

Di Kabupaten Sleman, kepala sekolah dituntut tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai *instructional leader* yang mampu:

1. Mengarahkan visi dan misi sekolah.
2. Membangun iklim akademik yang kondusif.
3. Mengoptimalkan sumber daya sekolah.
4. Mendorong keterlibatan *stakeholder*, termasuk orang tua dan masyarakat.

Dengan demikian, kepemimpinan kepala sekolah menjadi salah satu kunci untuk menciptakan sekolah yang berdaya saing dan adaptif terhadap tuntutan abad XXI.

2.5 Peran Orang Tua

Orang tua adalah mitra penting sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Epstein (2011) menekankan pentingnya *school, family, and community partnership* untuk mendukung perkembangan akademik maupun non-akademik siswa.

Di era digital, keterlibatan orang tua tidak hanya sebatas memberikan dukungan finansial, tetapi juga pendampingan belajar di rumah, pengawasan penggunaan teknologi, serta pembentukan karakter anak. Peran aktif orang tua sangat relevan dengan kondisi di Sleman, di mana latar belakang keluarga yang beragam menuntut adanya strategi kolaborasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi/campuran (*mixed methods*), yaitu memadukan metode kuantitatif dan kualitatif secara terintegratif.

- Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh variabel-variabel yang memengaruhi mutu pendidikan (kurikulum *deep learning*, guru, kepala sekolah, dan orang tua) terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Data kuantitatif diperoleh melalui angket/kuesioner, yang kemudian diolah dengan teknik statistik inferensial (regresi berganda).
- Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna, praktik/pengalaman empirik yang baik (*best practices*), dan kendala yang dihadapi para aktor pendidikan di lapangan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dan dokumentasi.

Penggunaan desain *mixed methods* ini bertujuan agar hasil penelitian tidak hanya berupa angka dan hubungan antarvariabel, tetapi juga menyajikan gambaran holistik yang kontekstual. Dengan demikian, strategi peningkatan mutu pendidikan dapat dirumuskan secara komprehensif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

3.2 Populasi dan Sampel

- Populasi Penelitian: Seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sleman, termasuk guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Populasi ini dipilih karena representatif untuk melihat potret mutu pendidikan di Sleman.

Tabel 3.1: Data Populasi Sekolah Taget Riset

No.	Jenjang	Status Negeri	Status Swasta	Jumlah Total
1	SD	374	139	513
2	SMP	54	71	125
	Total	428	210	638

- Sampel Penelitian: diambil sebanyak 262 sekolah dengan teknik acak stratifikasi berdasarkan:
 1. Wilayah (utara, timur, tengah, barat).
 2. Status sekolah (negeri dan swasta).
 3. Jenjang sekolah (SD dan SMP).

Stratifikasi ini bertujuan agar peta distribusi/sebaran sampel mencerminkan keragaman konteks pendidikan di Sleman.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi:

- Guru: untuk mengukur kompetensi, praktik pembelajaran, dan keterlibatan dalam peningkatan mutu.
- Kepala sekolah: untuk menilai gaya kepemimpinan, kebijakan internal, dan strategi pengembangan mutu sekolah.
- Siswa: untuk mengetahui hasil belajar serta pengalaman belajar berbasis *deep learning*.
- Orang tua: untuk menggali peran dan dukungan mereka dalam menunjang mutu pendidikan anak.

Jumlah sekolah yang dijadikan objek riset yang terpilih sebanyak 262 SD dan SMP se-Kabupaten Sleman. Terdiri dari 214 SD dan 48 SMP. Adapun sampel yang ditetapkan sebanyak 262 kepala sekolah, 262 guru, 448 orangtua, dan 488 siswa. Jumlah responden yang sudah mengisi kuisioner sebanyak 204 kepala sekolah, 374 guru, 1.045 guru, dan 1.263 pelajar.

3.4 Formulasi Variabel dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah dilakukan di atas, tim peneliti memformulasikan kerangka penelitian ini menempatkan:

Ada 5 variabel dalam penelitian ini. Di mana dikelompokkan dalam 2 jenis variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat.

Adapun variabel bebas yaitu:

X1= Pendekatan pembelajaran mendalam

X2 = Kompetensi guru

X3 = Kepemimpinan kepala sekolah

X4 = Peran orangtua

Variabel terikatnya yakni:

Y = Mutu pendidikan di Kabupaten Sleman

Hipotesis penelitian yang bisa dibangun dalam relasi antar variabel tersebut yaitu:

Hipotesis 1 = Pendekatan pembelajaran mendalam berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Sleman.

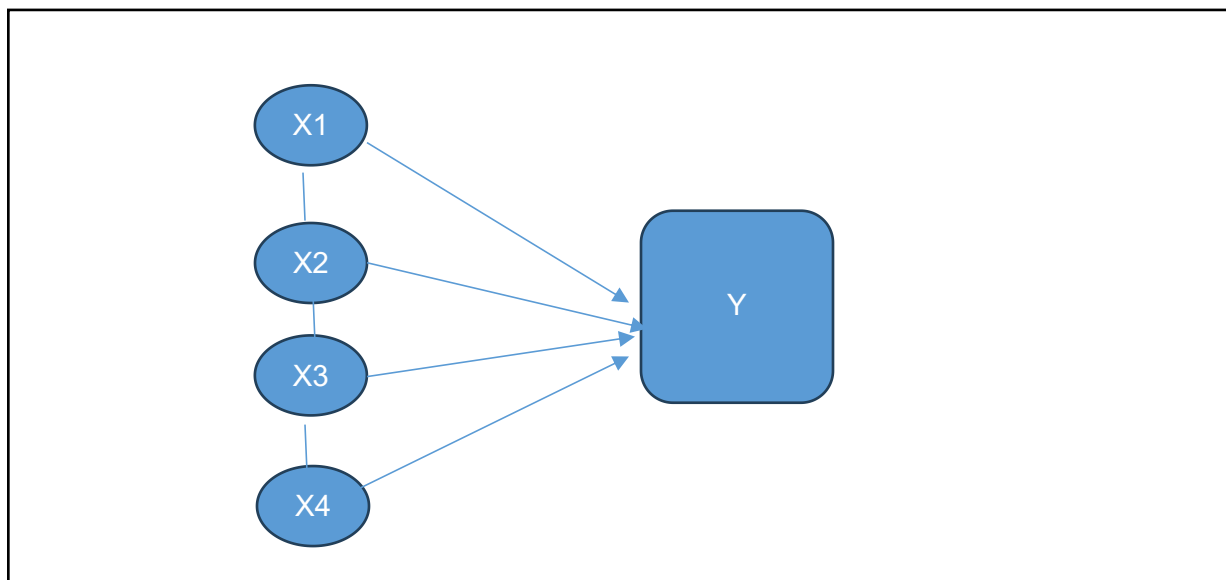
Hipotesis 2 = Kompetensi guru berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Sleman.

Hipotesis 3 = Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Sleman.

Hipotesis 4 = Peran orangtua berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Sleman.

Hipotesis 5 = Pendekatan pembelajaran mendalam, kompetensi guru, serta kepemimpinan kepala sekolah, dan peran orangtua secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Sleman.

Formulasi relasi antar variabel dalam penelitian:



Setelah dicari dampak atau pengaruh antar variabel tersebut, maka pemetaan mengenai strategi peningkatan mutu pendidikan di Sleman dapat dirumuskan secara komprehensif. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang selama ini masih memiliki sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

- Diberikan kepada guru, kepala sekolah, dan siswa, serta orang tua dengan skala *Likert* (1–5).
- Digunakan untuk mengukur implementasi kurikulum, kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan dukungan orang tua, serta evaluasi pembelajaran siswa.

Kuesioner ini sudah dibagikan kepada seluruh responden yang terpilih. Kuesioner disampaikan melalui *link Google Doc* dan disebarluaskan melalui aplikasi *Whatapps*, *email*, serta disampaikan melalui undangan resmi. Kuesioner ini didistribusikan sejak Oktober s/d November 2025 dan sudah diisi oleh ribuan responden (guru, kepala sekolah, pelajar, dan orangtua).

2. Wawancara mendalam/FGD

- ✧ Dilakukan kepada para pembuat kebijakan, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan perwakilan orang tua melalui Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) tiap kapanewon yang sudah digagas atau dibentuk oleh inisiatif Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman sejak tahun 2023.
- ✧ Bertujuan menggali perspektif, pengalaman, serta kendala yang tidak terungkap melalui data kuantitatif.

FGD sudah dilakukan pada Rabu, 9 November 2025 di Ruang Pangripta Bappeda Kabupaten Sleman dengan mengundang 120 narasumber terdiri dari para penentu kebijakan (DPRD Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Tenaga Ahli Bupati Sleman Bidang Pendidikan), kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, pengurus HIMPAUDI dan IGTK Kabupaten Sleman, dan komite sekolah melalui FKKS.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa data identitas sekolah, nilai rapor, data akreditasi sekolah, program sekolah, serta kebijakan pendidikan daerah.

4. Observasi

Dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan pada sekolah-sekolah yang menjadi target riset ini. Termasuk peneliti mendatangi langsung ke sekolah-sekolah yang menjadi target sasaran/objek dari riset ini.

5. Kajian Pustaka

Mengekstraksi berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik riset, termasuk sumber referensi lain yang mendukung riset ini. Riset-riset terdahulu tersebut bersumber dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan Internasional bereputasi.

3.6 Teknik Analisis Data

1. Analisis Kuantitatif

- Data dari angket dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y.
- Uji asumsi klasik dilakukan (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas) untuk memastikan validitas model.

2. Analisis Kualitatif

- Data dari wawancara, FGD, dan dokumentasi dianalisis dengan teknik analisis tematik (*coding*, kategorisasi, dan penarikan tema).
- Hasil analisis kualitatif dipakai untuk melengkapi dan memperdalam temuan kuantitatif.

3. Sintesis Data (Triangulasi)

- Hasil kuantitatif dan kualitatif dipadukan untuk merumuskan strategi peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
- Triangulasi memastikan bahwa strategi yang dirumuskan berbasis data empiris dan sesuai konteks lapangan.

3.7. Jadwal Penelitian (5 Bulan)

- Bulan 1: Penyusunan instrumen, koordinasi dengan sekolah, pengambilan data awal (angket).
- Bulan 2-3: Wawancara mendalam, FGD, observasi, pengolahan data kuantitatif.
- Bulan 4-5: Analisis data kualitatif, triangulasi, penyusunan laporan akhir dan rekomendasi kebijakan.

No.	Tahapan Riset	Waktu Pelaksanaan	PJ.	Ket.
1.	Pembuatan proposal riset	Agustus-September 2025	Tim riset	
2.	Pengumpulan data (kuesioner, FGD, observasi, kajian pustaka)	Oktober 2025	Tim riset	
3.	Olah data	November 2025	Tim riset	
4.	Penyusunan laporan akhir dan rekomendasi	November 2025	Tim riset	

5.	Pencetakan dan penjiilidan	Desember 2025	Tim riset	
----	----------------------------	---------------	-----------	--

3.8 Jumlah Anggaran

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1	Rakor penyusunan proposal riset, finalisasi hasil riset (5 kali)	3.000.000
2	FGD	18.000.000
3	Analisis dan olah data	2.650.000
4	Cetak hasil kajian/riset	1.125.000
5	Jilid hasil kajian/riset	555.000
Total		25.330.000

3.9. Tim Peneliti

- Penanggung Jawab: Drs. Ery Widaryana, M.M. (Ketua Dewan Pendidikan)
Mengawasi keseluruhan kegiatan penelitian dan memberi arahan strategis.
- Ketua Penelitian: Eko Priyo Nugroho, S.Pd.I., M.Pd. (Koordinator Bidang Kajian Kebijakan Riset dan Forum Ilmiah)
Memimpin tim penelitian, menyusun rencana kerja, dan mengoordinasikan kegiatan riset.
- Wakil Ketua Penelitian: Dr. Ir. Arif Bintoro Johan, M.Pd. (Wakil Ketua Dewan Pendidikan & Bidang Kelembagaan/Humas)
Mendukung koordinasi lintas bidang dan menjembatani komunikasi eksternal.
- Sekretaris: Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom. (Sekretaris Dewan Pendidikan & Bidang Riset/Forum Ilmiah)
Mengelola administrasi, surat-menyurat, dokumentasi rapat, dan laporan akhir.

- Wakil Sekretaris: Dr. Ariyanto Nugroho, S.KM., M.Sc. (Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan & Bidang Hukum/Advokasi)
Membantu administrasi, sekaligus memastikan aspek hukum dan etika penelitian.
- Bendahara: Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Bendahara Dewan Pendidikan & Bidang SDM)
Mengatur keuangan penelitian, menyusun laporan penggunaan anggaran.
- Koordinator Lapangan: Dr. Joko Sutikno, S.Pd., M.M. (Anggota Bidang Riset/Forum Ilmiah)
Mengatur teknis pengambilan data, koordinasi dengan sekolah sampel, dan monitoring kegiatan lapangan.
- Tim Pengumpul Data (Enumerator):
 - ✓ Sri Lestari, S.Pd., M.Pd. (Bidang Kurikulum/SDM)
 - ✓ Drs. Sutarto, M.M. (Bidang Kurikulum/SDM)
 - ✓ Syaeful Cahyadi, S.S. (Bidang Kelembagaan/Humas/Publikasi)
Melaksanakan angket, wawancara, observasi, serta pengumpulan dokumen di sekolah.
- Tim Pengolah Data:
 - ✓ Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Bidang SDM)
 - ✓ Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom. (Bidang Riset/Forum Ilmiah)
Melakukan *entry* data, analisis kuantitatif dan kualitatif, serta menyusun hasil temuan.
- Tim Publikasi & Diseminasi:
 - ✓ Dr. Marietta D. Susilawati, M.Hum. (Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Pendidikan)
 - ✓ Syaeful Cahyadi, S.S. (Koordinator Bidang Kelembagaan, Humas, Publikasi)
Menyusun *policy brief*, publikasi ilmiah, dan menyiapkan seminar penyampaian hasil.

BAB IV

HASIL DAN TEMUAN DATA

4.1 Uji Validitas

a. Uji Validitas ada dua metode yaitu:

1) Validitas *convergent* (Vinzi et al., 2010) dengan kriteria pengujian *Loading Factor* > 0,7 atau AVE > 0,50 maka data bisa dikatakan valid.

2) Validitas *discriminant*, menggunakan satu kriteria pengujian yaitu menggunakan nilai HTMT. Jika nilai HTMT < 0,90 maka data bisa dikatakan valid

Uji dengan metode Validitas *convergent*

Dalam uji validitas dengan metode ini didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Validitas *Loading Factor*

	Variabel X1	Variabel X2	Variabel X3	Variabel X4	Variabel Y
X1.1	0,745				
X1.2	0,728				
X1.3	0,751				
X1.4	0,785				
X1.5	0,787				
X2.1		0,826			
X2.2		0,824			
X2.3		0,852			
X2.4		0,851			
X2.5		0,855			
X3.1			0,882		
X3.2			0,890		
X3.3			0,885		
X3.4			0,861		
X3.5			0,867		
X4.1				0,764	
X4.2				0,740	
X4.3				0,773	
X4.4				0,785	
X4.5				0,820	
Y1					0,775
Y2					0,846
Y3					0,804
Y4					0,853
Y5					0,841

Berdasarkan Tabel 1 di atas didapat nilai di masing-masing variabel *Loading Factor* > 0,7 sehingga dapat disimpulkan validitas terpenuhi.

Tabel 2. Uji Validitas *Average variance extracted* (AVE)

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Variabel X1	0,817	0,822	0,872	0,577
Variabel X2	0,897	0,897	0,924	0,708
Variabel X3	0,925	0,925	0,943	0,769
Variabel X4	0,836	0,839	0,884	0,604
Variabel Y	0,882	0,884	0,914	0,680

Berdasarkan Tabel 2 nilai *Average Variance Extracted (AVE)* X1 sebesar 0,577 X2 sebesar 0,708 X3 sebesar 0,769 X4 sebesar 0,604 semua variabel nilainya > 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid.

Uji Validitas menggunakan metode *Validitas Discriminant*

Tabel 3. Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - List

	<i>Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)</i>
X2. <-> X1.	0,831
X3. <-> X1.	0,783
X3. <-> X2.	0,859
X4. <-> X1.	0,778
X4. <-> X2.	0,812
X4. <-> X3.	0,759
Y <-> X1.	0,822
Y <-> X2.	0,904
Y <-> X3.	0,882
Y <-> X4.	0,848

Berdasarkan hasil pada Tabel 3 maka untuk syarat uji validitas HTMT sudah terpenuhi dengan baik.

4.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menggunakan dua metode yaitu:

- 1) *Croabach's Alpha*, menggunakan kriteria pengujian nilai *croabach's alpha* > 0,70
- 2) *Composite Reliability (rho_c)*, menggunakan kriteria pengujian nilai *Composite Reliability (rho_c)* > 0,70

Perlu diketahui dalam menggunakan *SmartPLS* memberikan indikasi dengan warna. Warna hijau berarti baik, sedangkan warna merah berarti buruk.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Variabel X1	0,817	0,822	0,872	0,577
Variabel X2	0,897	0,897	0,924	0,708
Variabel X3	0,925	0,925	0,943	0,769
Variabel X4	0,836	0,839	0,884	0,604
Variabel Y	0,882	0,884	0,914	0,680

Berdasarkan nilai *Average variance extracted (AVE)* didapat nilai variabel X1 sebesar 0,577 variabel X2 sebesar 0,708 variabel X3 sebesar 0,769 variabel X4 sebesar 0,604 dan variabel Y sebesar 0,680 maka syarat Validitas *Convergent* lebih dari 0,50 terpenuhi. Untuk nilai *Cronbach's alpha* variabel X1 sebesar 0,817 variabel X2 sebesar 0,897 variabel X3 sebesar 0,925 variabel X4 sebesar 0,836 dan variabel Y sebesar 0,882. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa syarat validitas *Convergent* terpenuhi.

4.3 Uji Prasyarat (Uji Asumsi Klasik)

a. Uji Normalitas

Dalam uji normalitas bisa menggunakan 2 cara yaitu untuk uji normalitas dengan memeriksa nilai *skewness* dan kurtosis pada *output* data dianggap normal jika nilainya mendekati 0 atau dalam rentang -2 sampai 2 bisa juga menggunakan rentang -2,58 sampai 2,58.

Tabel 5. Nilai Kurtosis dan Skewnees

Name	No.	Type	Missings	Mean	Median	Scale min	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness	Cramér-von Mises p value
X1.1	1	MET	0	4.159	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.763	1.989	-1.048	0.000
X1.2	2	MET	0	3.995	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.773	1.564	-0.882	0.000
X1.3	3	MET	0	4.322	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.753	4.502	-1.589	0.000
X1.4	4	MET	0	4.308	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.644	1.844	-0.804	0.000
X1.5	5	MET	0	4.170	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.683	1.837	-0.771	0.000
X2.1	6	MET	0	4.249	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.666	1.663	-0.753	0.000
X2.2	7	MET	0	4.197	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.672	1.745	-0.756	0.000
X2.3	8	MET	0	4.371	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.660	2.694	-1.096	0.000
X2.4	9	MET	0	4.459	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.632	2.975	-1.206	0.000
X2.5	10	MET	0	4.419	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.628	2.814	-1.078	0.000
X3.1	11	MET	0	4.323	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.668	2.440	-1.003	0.000
X3.2	12	MET	0	4.339	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.670	2.262	-1.004	0.000
X3.3	13	MET	0	4.289	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.657	1.936	-0.827	0.000
X3.4	14	MET	0	4.250	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.696	1.615	-0.851	0.000
X3.5	15	MET	0	4.243	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.669	2.138	-0.841	0.000
X4.1	16	MET	0	4.047	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.733	0.525	-0.512	0.000
X4.2	17	MET	0	4.099	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.750	1.113	-0.759	0.000
X4.3	18	MET	0	4.300	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.657	2.711	-0.988	0.000
X4.4	19	MET	0	4.446	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.628	3.488	-1.235	0.000
X4.5	20	MET	0	4.248	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.677	1.598	-0.792	0.000
Y1	21	MET	0	4.115	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.666	1.437	-0.605	0.000
Y2	22	MET	0	4.223	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.681	2.065	-0.872	0.000
Y3	23	MET	0	4.333	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.706	3.896	-1.366	0.000
Y4	24	MET	0	4.194	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.652	2.264	-0.767	0.000
Y5	25	MET	0	4.254	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.646	2.642	-0.854	0.000

Berdasarkan Tabel 5 didapat nilai *skewness* semua indikator/item pengukuran normal karena nilai *skewness* antara -2 sampai dengan 2.

Berdasarkan nilai secara kurtosis ada indikator yang nilainya lebih dari 2 ada 13 yang tidak normal yaitu X1.3, X2.3, X2.4, X3.1, X3.2, X3.5, X4.3, X4.4, Y2, Y3, Y4, Y5

b. Uji Linieritas

Uji linieritas adalah prosedur untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat linier, sehingga analisis statistik yang digunakan termasuk regresi atau pemodelan struktural dapat memberikan hasil yang valid.

Tabel 6. Uji Linieritas

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1. -> Y	0,130	0,130	0,017	7,588	0,000
X2. -> Y	0,305	0,306	0,022	13,664	0,000
X3. -> Y	0,311	0,311	0,022	13,886	0,000
X4. -> Y	0,217	0,217	0,018	12,326	0,000
QE (X1.) -> Y	0,033	0,033	0,011	3,020	0,003
QE (X2.) -> Y	-0,003	-0,002	0,014	0,187	0,852
QE (X3.) -> Y	-0,034	-0,034	0,013	2,639	0,008
QE (X4.) -> Y	0,000	0,000	0,011	0,026	0,980

c. Uji Multikolinieritas

Adanya multikolinieritas dapat berasal dari relasi dua variabel bebas maupun lebih. Nilai tolerabilitas melebihi 0,1 maupun VIF melebihi 5 adalah variabel yang menyebabkan multikolinieritas. Berikut tabel menunjukkan hasil uji multikolinieritas.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

	VIF
X4	2,233
X2	3,338
X3	2,909
X1	2,307

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel diperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel X1 sebesar 2,307 variabel X2 sebesar 3,338 variabel X3 sebesar 2,909 variabel X4 sebesar 2,233. Karena nilai VIF semua variabel < 5 maka bisa ditarik simpulan jika model regresi yang digunakan bebas multikolinieritas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Capaian uji heteroskedastisitas yakni guna memahami ada tidaknya ketimpangan varians antara residu pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain pada suatu model regresi.

Kriteria uji Heteroskedastisitas jika nilai $P \text{ Values} < 0,05$ maka disimpulkan hasil uji heteroskedastisitas tidak lolos dan jika nilai $P \text{ Values} > 0,05$ disimpulkan lolos uji heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	<i>Test-Statistic</i>	<i>df</i>	<i>P value</i>
<i>Breusch-Pagan Test</i>	33,908	4	0,000

Pada uji heteroskedastisitas untuk nilai $P \text{ Values}$ sebesar 0,00. Sehingga disimpulkan hasil heteroskedastisitas tidak lolos.

4.4 Uji Hipotesis

a. Uji T (Signifikan Parsial)

Uji T atau uji parsial kriterianya $P \text{ Values} < 0,05$ kesimpulannya berpengaruh signifikan dan jika $P \text{ Values} > 0,05$ Tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 9. Hasil Uji T (Signifikan Parsial)

	<i>Unstandardize d coefficients</i>	<i>Standardize d coefficients</i>	SE	T value	P value	2.5 %	97.5 %
X4	0,221	0,214	0,014	15,372	0,000	0,193	0,249
X2	0,319	0,317	0,017	18,620	0,000	0,286	0,353
X3	0,312	0,333	0,015	20,92	0,000	0,282	0,341

				3	0		
X1	0,108	0,107	0,014	7,572	0,000	0,080	0,136
<i>Intercept</i>	0,579	0,000	0,228	2,538	0,011	0,132	1,027

Berdasarkan tabel hasil uji T diperoleh nilai P value (X1, X2, X3, X4) yakni 0,000 maka bisa ditarik kesimpulan:

- 1) Variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1
 - 2) Variabel Y dipengaruhi oleh variabel X2
 - 3) Variabel Y dipengaruhi oleh variabel X3
 - 4) Variabel Y dipengaruhi oleh variabel X4
- b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau uji simultan kriterianya jika nilai $P\text{ Values} < 0,05$ maka kesimpulannya berpengaruh simultan dan jika nilai $P\text{ Values} > 0,05$ maka kesimpulannya tidak berpengaruh secara simultan.

Tabel 10. Hasil Uji F (Signifikan Simultan)

	<i>Sum square</i>	<i>df</i>	<i>Mean square</i>	<i>F</i>	<i>P value</i>
Total	21994,997	2885	0,000	0,000	0,000
<i>Error</i>	5504,982	2881	1,911	0,000	0,000
<i>Regression</i>	16490,015	4	4122,504	2157,488	0,000

Merujuk pada tabel temuan uji F diatas dapat dipahami jika $P\text{ value}$ sejumlah 0,00. Sehingga bisa disimpulkan variabel X1, X2, X3, X4 berdampak simultan pada variabel Y.

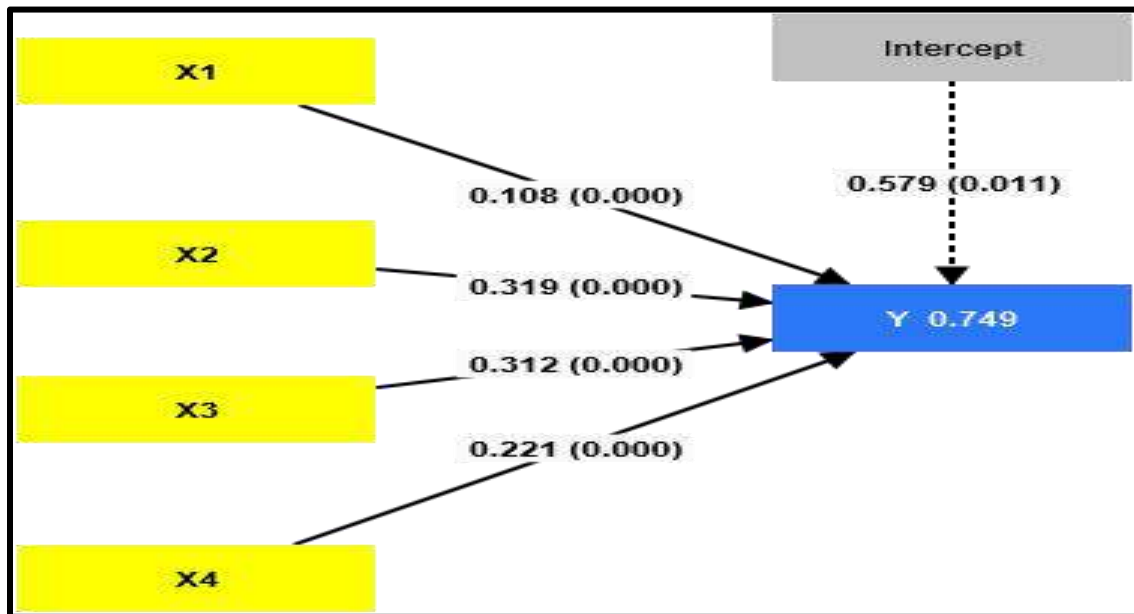
c. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi dimanfaatkan guna memahami sebaik apa variabel bebas serta variabel terikat menjelaskan variabilitas model regresi. Koefisien Determinasi disimbolkan sebagai R^2 memberikan indikasi tentang seberapa baik model regresi dapat memprediksi variabel bebas dan variabel terikat

Tabel 11. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

	Y
<i>R-square</i>	0,750
<i>R-square adjusted</i>	0,749
<i>Durbin-Watson test</i>	1,932

Uji koefisien determinasi dilihat dari nilai *R-square adjusted* yaitu 0,749. Dengan demikian kontribusi variabel bebas (X1, X2, X3, X4) atas variabel terikat (Y) secara simultan sebesar 74,9 persen secara simultan.



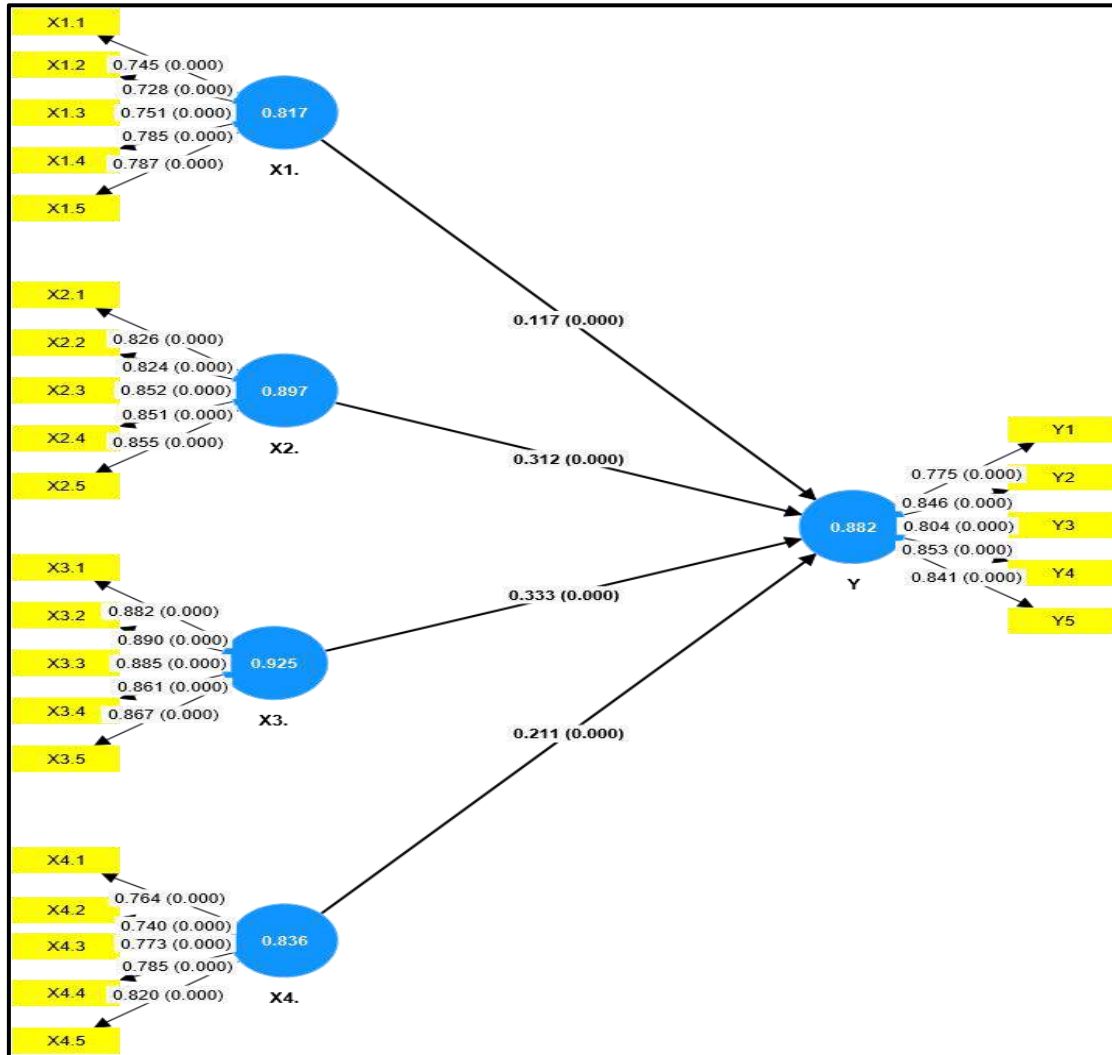
Gambar 1. Grafik *Output* Koefisien Determinasi

Berdasarkan pada gambar grafik *Output* Koefisien Determinasi di atas diketahui bahwa:

- 1) Variabel X1 memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,108 yang berarti apabila variabel X1 naik artinya Y dapat meningkat.
- 2) Variabel X2 memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,319 yang berarti apabila variabel X2 naik artinya Y dapat meningkat.
- 3) variabel X3 memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,312 yang berarti apabila variabel X2 naik artinya Y dapat meningkat.
- 4) variabel X4 memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,221 yang berarti apabila variabel X4 naik artinya Y dapat meningkat.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang digunakan pada kajian ini adalah memanfaatkan *path analysis*



Gambar 2. *Path Analysis*

Gambar di atas secara spesifik dapat dimaknai dari *Path Coeficient Output* pada tabel berikut:

Tabel 12. *Path Coeficient Output*

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1. -> Y	0,117	0,117	0,017	6,782	0,000
X2. -> Y	0,312	0,312	0,022	14,331	0,000
X3. -> Y	0,333	0,333	0,022	15,026	0,000
X4. -> Y	0,211	0,211	0,018	11,748	0,000

Hasil tes di atas dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Variabel implementasi kurikulum dengan pendekatan *Deep Learning* (X1) berpengaruh terhadap mutu pendidikan
2. Variabel peran kompetensi guru (X2) berpengaruh terhadap mutu pendidikan
3. Variabel peran kepemimpinan kepala sekolah (X3) berpengaruh terhadap mutu pendidikan
4. Variabel peran orang tua (X4) berpengaruh terhadap mutu pendidikan

4.5 Ringkasan Pemaknaan Temuan Kuantitatif (*SmartPLS*)

Berdasarkan data statistik:

1. Semua variabel X1, X2, X3, X4 berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan (Y). Uji T (*P value* 0,000) menunjukkan semua pengaruh signifikan dengan besaran yang beragam (variatif).
2. Besaran pengaruh variabel berbeda-beda antar variabel sebagaimana tercantum dalam Tabel 12.

Path Coefficient (Tabel 12):

Variabel	Koefisien	Pengaruh
X3 – Kepemimpinan Kepala Sekolah	0,333	Pengaruh terkuat/terbesar
X2 – Kompetensi Guru	0,312	Pengaruh kuat
X4 – Orang Tua	0,211	Pengaruh sedang
X1 – Kurikulum <i>Deep Learning</i>	0,117	Pengaruh paling kecil, namun masih cukup signifikan

1. Pengaruh simultan

Uji $F \rightarrow P = 0,000$, berarti keempat variabel berpengaruh secara bersama-sama terhadap mutu pendidikan.

2. Kontribusi model (R^2)

Mutu pendidikan dijelaskan oleh X1–X4 sebesar:

R^2 Adjusted = 0,749 (74,9 %)

Artinya model interelasi antar variabelnya sangat kuat.

4.5 Makna Temuan Kuantitatif yang Diperkuat Data Kualitatif

Berikut interpretasi *explanatory*—menggabungkan angka dan makna lapangan.

1. Variabel X1 – Kurikulum *Deep Learning*

Temuan Kuantitatif

X1 memiliki pengaruh signifikan, namun paling kecil (0,117) terhadap mutu pendidikan.

Penjelasan Kualitatif

Data lapangan menunjukkan bahwa:

- Guru menerapkan komponen 4C (*critical thinking, creativity, collaboration, communication*).
- Namun implementasi tidak merata; sebagian guru masih menggunakan metode konvensional. Bahkan pengawas sekolah dalam FGD menjelaskan bahwa sejumlah sekolah masih berproses dalam penerapan kurikulum pendekatan pembelajaran mendalam, sehingga belum bisa diketahui dampaknya. Para guru juga sebagian mengaku belum memahami dengan baik substansi dari deep learning.
- Hambatan utama: literasi teknologi, kesiapan guru, waktu, kesiapan siswa.

● Interpretasi *Explanatory*

1. Pengaruh X1 kecil secara statistik karena implementasinya belum konsisten.
- Kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam secara konseptual/teoritis bermutu baik, tetapi belum dapat dilaksanakan secara merata. Akibatnya, kontribusinya terhadap mutu pendidikan belum/tidak optimal di Kabupaten Sleman.
2. Variabel X2 – Guru (Kompetensi Profesional, Pedagogik, Sosial, Kepribadian)

Temuan Kuantitatif

Koefisien 0,312, pengaruh besar dan signifikan.

Penjelasan Kualitatif

- Guru menguasai materi.
- Guru berkomunikasi baik, memberi umpan balik, dan menjadi teladan.
- Namun masih terdapat tantangan pemanfaatan teknologi.
- Interpretasi *Explanatory*
- Guru menjadi aktor paling sentral dalam meningkatkan mutu, karena kualitas interaksi guru–siswa menentukan efektivitas implementasi kurikulum.
- Keterbatasan *digital teaching* menjelaskan mengapa pengaruh X2 tidak lebih tinggi lagi.

3. Variabel X3 – Kepemimpinan Kepala Sekolah

Temuan Kuantitatif

Koefisien 0,333 → menjadi pengaruh yang paling kuat terhadap mutu pendidikan.

Penjelasan Kualitatif

- Kepala sekolah memberi motivasi dan teladan.
- Menggerakkan inovasi dan budaya mutu.
- Supervisi akademik berjalan, tetapi intensitasnya bervariasi antar sekolah.
-

Interpretasi *Explanatory*

- Kepemimpinan transformasional adalah kunci penggerak sistem.
- Sekolah dengan kepala sekolah aktif menunjukkan implementasi kurikulum dan kinerja guru yang lebih baik.
- Variasi mutu antar sekolah disebabkan oleh perbedaan kualitas kepemimpinan.

4. Variabel X4 – Keterlibatan Orang Tua

Temuan Kuantitatif

Koefisien 0,211, signifikan dan berpengaruh sedang.

Penjelasan Kualitatif

- Orang tua aktif mendampingi belajar, komunikasi, dan kegiatan sekolah.
- Namun keterlibatan berbeda antar sekolah karena faktor pekerjaan, waktu, ekonomi.

Interpretasi *Explanatory*

1. Pengaruh X4 sedang karena tingkat keterlibatan orang tua tidak seragam.
2. Di sekolah dengan keterlibatan tinggi, mutu akademik meningkat lebih cepat.

5. Variabel Y – Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan tergambar dari:

- Kenaikan nilai akademik,
- Iklim sekolah kondusif,
- Kepuasan stakeholder,
- Peningkatan aktivitas siswa,
- Budaya mutu di sekolah.

Kedua data (stats & kualitatif) saling mengonfirmasi bahwa mutu meningkat ketika ekosistem pendidikan berfungsi secara kolaboratif.

4.6 Integrasi Kuantitatif–Kualitatif (Model *Explanatory*)

Gabungan data menghasilkan model penjelasan komprehensif:

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah (X3) → pendorong utama perubahan

Data kualitatif menunjukkan bahwa:

- Kepala sekolah menggerakkan budaya inovasi,
- Memfasilitasi guru,
- Memperkuat disiplin,
- Memastikan implementasi deep learning.

Hal ini menjelaskan mengapa secara kuantitatif X3 adalah variabel paling kuat.

2. Kompetensi Guru (X2) → pelaksana inti mutu pembelajaran

Guru yang profesional mampu:

- mengimplementasikan kurikulum,
- Menciptakan pembelajaran aktif,
- Memperkuat motivasi siswa.

Ini menjelaskan mengapa X2 memiliki pengaruh besar (0,312).

3. Kurikulum *Deep Learning* (X1) → efektivitasnya bergantung pada guru dan kepala sekolah

Implementasi belum merata → menjelaskan koefisien pengaruh X1 kecil.

4. Keterlibatan Orang Tua (X4) → memperkuat konsistensi belajar

Pengaruhnya kuat di sekolah yang partisipasinya tinggi; moderat di sekolah lain.

4.7 Model Simpulan Komprehensif (*Mixed Methods*)

1. Keempat variabel X1-X2-X3-X4 terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap mutu pendidikan (Y).
2. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor paling menentukan, karena mempengaruhi: budaya mutu, motivasi guru, implementasi *deep learning*, dan hubungan sekolah-orang tua.
3. Kompetensi guru menjadi aktor pelaksana yang menentukan kualitas pembelajaran.
4. Kurikulum *deep learning* efektif, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan guru.
5. Keterlibatan orang tua memperkuat hasil belajar, terutama pada sekolah dengan komunikasi intensif.
6. Model regresi menjelaskan 74,9 persen variasi mutu pendidikan, menunjukkan hubungan yang sangat kuat.

4.8 Rumusan Temuan Utama Penelitian *Mix Method* (*Explanatory*)

Mutu pendidikan meningkat secara signifikan melalui sinergi antara model kepemimpinan transformasional kepala sekolah, kompetensi guru yang kuat, implementasi kurikulum berbasis *deep learning*, serta keterlibatan aktif orang tua. Pendekatan *explanatory* menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh terbesar secara statistik (kepala sekolah dan guru) juga terbukti kuat secara kualitatif sebagai pendorong budaya mutu dan praktik pembelajaran inovatif.

BAB V

PEMBAHASAN KOMPREHENSIF DAN DISKUSI

5.1 Potret Lembaga Pendidikan Terkini di Kabupaten Sleman

Secara kuantitatif, merujuk pada Satu Data Pendidikan Kabupaten Sleman (2024), jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman berjumlah 1.890 buah terdiri atas 1.136 PAUD (KB, TK, TPA, SPS, RA), 559 SD, 168 SMP, 46 SMA, 57 SMK, dan 41 Perguruan Tinggi. Berbagai Lembaga Pendidikan tersebut di bawah pembinaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Agama. Ada 320.740 pelajar dan mahasiswa yang tengah menuntut ilmu di berbagai sekolah di Kabupaten Sleman. Mereka terdiri atas 44.394 pelajar PAUD, 93.758 pelajar SD; 51.242 pelajar SMP; 4.296 pelajar PKBM, 13.930 pelajar SMA; dan 9.402 pelajar SMK, serta 103.718 mahasiswa. Sedangkan jumlah guru atau pendidik serta tenaga pendidik seluruhnya mencapai 19.709 guru dan 2.914 dosen.

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang saat ini sudah tembus lebih dari 1,16 juta jiwa menunjukkan potensi Sumber Daya Manusia yang unggul. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman. Terutama dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan swasta yang ada di Kabupaten Sleman, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/K, sampai Perguruan Tinggi. Secara kuantitas, pertumbuhan Lembaga Pendidikan swasta tersebut sangat mendominasi jika dibandingkan dengan Lembaga Pendidikan berplat merah atau negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sleman memiliki kepedulian yang sangat tinggi dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik/BPS (2023), Kabupaten Sleman berhasil menorehkan prestasi menjadi kabupaten dengan Sumber Daya Manusia (SDM) paling maju di Indonesia jika dibandingkan dengan ratusan kabupaten lainnya di Indonesia. Sebab *Human Development Index (HDI)* 2023 sudah mencapai 84,86. Kabupaten lainnya yakni Badung (Bali) memiliki HDI sebesar 83,00; Kabupaten Sidoarjo sebesar 81,88. Kabupaten Bantul tercatat 81,74; Gianyar Bali 79,69; Sukoharjo 78,65; Minahasa menempati peringkat ke-7 dengan HDI sebesar 78,48; Gresik 78,44; Natuna 78,23 dan Tabanan Bali 77,87. Pada 5 Juli 2024, Kabupaten Sleman

juga mendapatkan tiga penghargaan dalam Anugerah Merdeka Belajar 2024 sekaligus dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun tiga kategori anugrah atau penghargaan tersebut yaitu: Anugerah Merdeka Belajar Kategori Utama, Kategori Transformasi SDM Pendidikan, dan Kategori Transformasi Pengelolaan Pendidikan.

Jenis satuan pendidikan secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu 1) satuan pendidikan umum dengan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2) satuan pendidikan madrasah/keagamaan dengan ijin operasional dari Kantor Kementerian Agama, 3) satuan pendidikan umum dengan ijin operasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) atau sekarang bernama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai dengan regulasi, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman hanya berwenang mengelola satuan pendidikan umum pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan yang ijin operasionalnya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman saja (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2023).

a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini – Nonformal (KB, TPA, SPS)

Tabel 1.1. Rekapitulasi Satuan PAUD – Non Formal (KB, TPA, SPS)

Jenjang/ Status Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik	Jumlah PTK
1. PAUD - NF	551	1.833	15.861	2.486
Negeri	1	5	43	5
Swasta	550	1.828	15.818	2.481
a. KB	232	838	7.315	1.115
Negeri	1	5	43	5
Swasta	231	833	7.272	1.110
b. SPS	237	691	5.880	968
Swasta	237	691	5.880	968
c. TPA	82	304	2.666	403
Swasta	82	304	2.666	403

b. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini – Formal (TK)

Tabel 1.2. Rekapitulasi Satuan PAUD – Formal (TK)

Jenjang/ Status Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik	Jumlah PTK
2. PAUD - TK	511	1.602	26.163	2.635
Negeri	5	36	593	58
Swasta	506	1.566	25.570	2.577

c. Satuan Pendidikan Dasar – SD

Tabel 1.3. Rekapitulasi Satuan Pendidikan Dasar – SD

Jenjang/ Status Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik	Jumlah PTK
3. Dikdas - SD	530	3.981	87.367	7.156
Negeri	374	2.538	55.349	4.647
Swasta	137	1.344	30.366	2.410

d. Satuan Pendidikan Dasar – SMP

Tabel 1.4. Rekapitulasi Satuan Pendidikan Dasar – SMP

Jenjang/ Status Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik	Jumlah PTK
4. Dikdas - SMP	145	1.402	41.684	3.515
Negeri	54	757	24.059	1.789
Swasta	70	581	16.357	1.584

e. Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Tabel 1.5. Rekapitulasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jenjang/ Status Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik	Jumlah PTK
5. Kesetaraan	24	224	4.115	358
Negeri	1	10	147	16
Swasta	23	214	3.968	342
a. Paket A	19	99	1.652	99
Negeri	1	3	5	3

Swasta	18	96	1.647	96
--------	----	----	-------	----

Jenjang/ Status Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik	Jumlah PTK
b. Paket B	21	64	1.268	142
Negeri	1	3	42	6
Swasta	20	61	1.226	136
c. Paket C	19	61	1.195	117
Negeri	1	4	100	7
Swasta	18	57	1.095	110

Ada ribuan lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman saat ini. Tentu semuanya membutuhkan tata kelola yang memadai untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Menjadi tantangan besar dan berat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk membangun dunia pendidikan yang humanis dan mencerdaskan. Sekaligus peluang besar untuk melejitkan terjadinya percepatan pembangunan di Kabupaten Sleman, di masa kini dan yang akan datang.

5.2 Strategi Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sleman dan Implementasi Kurikulum dengan Pendekatan Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) pada Berbagai SD dan SMP se-Kabupaten Sleman

5.2.1 Perspektif Para Pemegang Kebijakan Pendidikan di Sleman

Dunia pendidikan menjadi salah satu bidang yang paling kompleks tata kelola sekaligus masalahnya untuk ditangani oleh pemerintah daerah maupun pusat. Dalam konteks daerah, kebijakan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sleman melibatkan berbagai unsur manajemen tingkat atas antara lain: Bupati Sleman, DPRD Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, dan *stakeholders* lainnya baik yang berada pada instansi horisontal maupun vertikal.

Arif Priyosusanto selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman menyoroti masalah pentingnya peningkatan sekaligus pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Sebab pemerataan dan peningkatan kualitas/mutu pendidikan menjadi masalah prioritas di Sleman. Hal tersebut dilakukan agar semua sekolah bisa menjadi sekolah favorit di mana terjadi pemerataan kualitas/mutunya. Strategi yang dilakukan yakni melalui peningkatan anggaran, pendampingan kompetensi guru agar semakin profesional, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang

memadai. Melalui kebijakan DPRD Kabupaten Sleman akan sama yakni mendukung kebijakan Bupati Sleman--yang saat ini konsen dalam peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Program Bupati Sleman salah satunya yakni minimal satu sarjana setiap keluarga menjadi relevan untuk didukung dan didorong untuk itu. Kalau untuk anggaran sejak dulu sudah sesuai dengan perintah Undang-Undang. Memang paling besar pembiayaannya digunakan untuk membayar biaya gaji guru dan tenaga pendidikan di Sleman. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Sleman mempunyai sekolah dalam jumlah yang terbanyak. Berbeda dengan jumlah lembaga pendidikan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul--yang kuantitasnya lebih kecil.

DPRD Kabupaten Sleman menginginkan agar kondisi seluruh bangunan lembaga pendidikan di Sleman berkualitas bagus. Agar kegiatan belajar-mengajar di berbagai sekolah tidak terganggu karena adanya bangunan yang rusak. Termasuk adanya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dimaksudkan agar dapat mampu meringankan beban masyarakat, meningkatkan sekaligus pemerataan dan menyetarakan mutu pendidikan. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu yang menyedot anggaran dalam jumlah cukup besar.

Selama 5 tahun ke depan, DPRD Kabupaten Sleman berkomitmen untuk selalu menaikkan BOSDA tiap tahun, namun dengan menetapkan klasifikasi tertentu. Perlu juga dipastikan agar penerima BOSDA tepat sasaran. Artinya sekolah-sekolah yang berhak mendapatkan BOSDA harus benar-benar dapat terukur dan terkontrol dengan baik. Hal itu menjadi ranah kebijakan daerah sebab memanfaatkan anggaran yang bersumber dari APBD.

Sekolah yang sudah kaya dan elit akan dikurangi BOSDA-nya, sebab mereka sudah mendapatkan BOSNAS. Apabila sekolah elit tersebut menerima murid yang tidak mampu secara ekonomi (miskin), maka mereka juga berhak diberikan BOSDA penuh juga. Untuk insentif guru diupayakan tetap tidak dikurangi. Dalam bidang pengawasan, DPRD Kabuapten Sleman melakukan monitoring, di mana tiap kapanewon dapat terpantau dengan baik bagaimana jalannya pendidikan di Sleman. Bahkan DPRD Kabupaten Sleman meminta masyarakat jika menemukan adanya kejanggalan bidang pendidikan, bisa langsung melaporkannya langsung ke DPRD Kabupaten Sleman. Jangan hanya diviralkan saja, yang justru membuat masalah menjadi besar dan ke mana-mana serta bahkan tidak selesai.

Menurut Arif Priyosusanto Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman, sebaiknya bagi sekolah yang memang berprestasi akan diberikan bonus. Langkah ini akan memotivasi seluruh sekolah berlomba-lomba meningkatkan mutunya. Tapi jangan juga selalu diberikan ke sekolah yang itu-itu saja; misalnya ke SMP Negeri 4 Pakem yang mutunya sudah sangat baik sejak dulu sampai sekarang. Prinsipnya, bonus tersebut bisa disebar ke sekolah-sekolah yang berprestasi lainnya secara merata. Sekolah-sekolah akan diberikan bonus TV pintar atau *smart TV*. Sebuah gawai yang memiliki berbagai keunggulan audio visual untuk mendukung pembelajaran mendalam; sebab dapat digunakan untuk berbagai kepentingan akademik. Yang jelas sudah dianggarkan dulu agar ada kegiatan sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran.

Sarana TV pintar tersebut harganya bervariasi per unitnya sekitar Rp 26-30 juta, anggarannya dari pusat. Yang ada di Kabupaten Sleman itu harganya sampai Rp 20 juta per buah. Ada juga yang sampai Rp 75 juta per unit harganya. Cara pemakaian *smart TV* sudah diberikan percontohan dengan cara modelnya sudah diundang, sekaligus sudah dilakukan sosialisasi dan internalisasi pada berbagai sekolah.

Berhubungan dengan APBD Sleman mencapai Rp 3,2 triliun. Kalau 20 persen itu murni, maka Kabupaten Sleman sudah mencapainya untuk anggaran pendidikan. Dinas Pendidikan Sleman diberikan alokasi anggaran sekitar Rp 900 miliar untuk mendukung program pendidikan berkelanjutan di Sleman. Semuanya harus ditata dan diatur dengan baik. Proyeksinya, ke depan Sleman bisa merealisasikan 20 persen dari APBD untuk kepentingan pendidikan, di luar gaji pegawai dan biaya pengembangan SDM. Namun jika hal itu dilakukan saat ini, bisa-bisa tidak bisa jalan semua program di dinas lainnya. Sebab semuanya harus berbagi.

Arif Priyosusanto menekankan penting adanya kebijakan *refocusing* anggaran. Sebenarnya *refocusing* bertujuan untuk penghematan anggaran, terutama untuk kegiatan yang banyak seremonialnya. Anggaran diprioritaskan untuk kegiatan yang aplikatif. Kami menyikapi hal tersebut. DPRD Sleman meyakini pada akhir tahun 2025 akan ada Rp 200 miliar yang bisa dikembalikan dan diakses kembali sebagai efek dari penghematan tersebut.

Mustadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam di Sleman menjadi sebuah tantangan menarik. Kurikulum tersebut dapat terinternalisasi kepada anak-anak dengan baik. Mereka harus memiliki kesadaran, sehingga anak-anak harus tahu manfaatnya untuk ke depan. Untuk itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi; sehingga proses belajar-mengajar dapat kondusif. Agar mutu pendidikan semakin merata di Sleman perlu adanya pemerataan sarana dan prasarana, teknologi, termasuk ketersediaan kualitas guru dan kepala sekolah pada setiap lembaga pendidikan.

Adanya rasionalisasi anggaran benar-benar berimbas berhubungan dengan BOSDA. Anggaran yang namanya anggaran *mandatory*, semua OPD dipotong sampai Rp 60 milyar. Termasuk adanya pengurangan BOSDA dari Rp 555.000 menjadi 338.500. Angka ini mengalami penurunan cukup signifikan.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan bagi mereka mengikuti PPG. Penting untuk melakukan revitalisasi pendidikan, baiknya kita punya data prioritas agar ada data daerah yang tersambung pada data di pusat. Program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi, dapat dilakukan dengan daerah harus menyampaikan surat ke pusat; sehingga terjadi sinkronisasi data pokok pendidikannya.

Menurut Ponidi, Kepala Bidang Pembinaan Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, untuk mendukung kebijakan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman telah melakukan sinkronisasi antara program pusat dan daerah. Langkahnya dengan memberdayakan MKKS, K3S, MGMP dan guru BK. Ada tim inti juga yang sudah dilatih oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dapat berimbas ke para kolega dan masyarakat. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebab

diuntungkan banyak personil dari DIY yang terlibat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menangani kurikulum berpendekatan pembelajaran mendalam tersebut. Selain lembaga pendidikan, secara personal kita kenal dengan baik para narasumber tersebut.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam yakni: pertama, adanya paradigma atau *mind set* yang tidak mau berubah masih menghinggapi benak banyak orang. Kedua, kalau di sekolah guru-guru melaksanakan pembelajaran, mereka terpaksa harus meninggalkan tugas untuk melaksanakan pelatihan. Bagi sekolah kecil, hal itu menjadi masalah, sebab gurunya yang jumlahnya sedikit ikut pelatihan; kelas menjadi kosong. Untuk sekolah yang besar saja masih menjadi masalah serupa. Sehingga masih sering adanya kelas yang kosong, karena terdapat sejumlah guru yang mengikuti pelatihan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam.

Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Dwi Warni Yulastuti menambahkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga menguatkan dari sisi teknis pelaksanaan kurikulum berpendekatan pembelajaran mendalam. Untuk melaksanakan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam sudah ada panduan secara nasional, namun dalam tataran operasional tergantung pada kebijakan masing-masing daerah. Tahun ini, jatah kuota guru yang dapat mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) ada 600.000 orang berdasar kuota pusat. Namun ada yang tak bisa mengikutinya dengan baik karena sakit, izin melahirkan, dan alasan lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan melakukan inventarisasi guru yang belum terpanggil. Terkait dengan kuota, Sleman diberikan kuota dengan jumlah terbatas. Namun kami belum mengecek data, tahun ini ada berapa guru di Sleman yang mengikuti PPG dan lulus kegiatan tersebut.

Menurut Litha Ristiyati tenaga ahli Bupati Sleman bidang pendidikan mengungkapkan bahwa saat ini masih terbatas karena anggaran 60 persen dari pusat; meski Pendapatan Asli Daerah Sleman memang naik; namun belum mencukupi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesehatan. Ketika anggaran naik, maka banyak program yang dapat terfasilitasi dengan baik. Guru kompetensinya juga akan menjadi lebih baik sebab mendapatkan perhatian, bimbingan, dan pelatihan profesional.

Agar bisa meningkatkan potensi daerah, secara teknologi sekolah-sekolah swasta jauh lebih maju dan unggul. Hal tersebut menjadi tantangan bersama Kabupaten Sleman. Dari berbagai hal yang menjadi kendala dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Sleman, semoga ke depan bisa dicarikan solusi bersama.

Salah satu pintu masuk penerapan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam adalah soal koding. Menurut Dwi Warni Yulastuti, solusi belum tersedianya para guru yang menguasai materi mengenai koding; bisa diatasi dengan mengintegrasikan dengan mata pelajaran informatika; yang bisa mengajarkan dengan baik. Dengan mengadakan bimbingan teknis berhubungan dengan masalah tersebut juga menjadi langkah taktisnya.

Ponidi menambahkan, saat ini hampir seluruh guru di Kabupaten Sleman sudah penuh dalam mengajar. Jika ada guru yang mengikuti pelatihan atau bimtek tentang kurikulum berpendekatan pembelajaran mendalam, tentu akan membuat kegiatan pembelajaran di sekolah

menjadi terganggu. Tentang sarana dan prasarana sudah terfasilitasi, namun kendalanya, karena modelnya bergiliran antar sekolah. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Durasi teknologi itu terikat oleh waktu, misalnya teknologi yang saat ini dianggap modern, namun 10 tahun kemudian sudah ketinggalan. Contoh sederhana SMP Negeri 4 Pakem saat ini sudah melakukannya *upgrade* teknologi dengan metode pembelajaran memanfaatkan *smart TV*.

Persoalan sarana dan prasarana yang masih menjadi kendala berbagai sekolah, bisa diatasi melalui beragam strategi. Solusinya, salah satunya melalui program kerjasama dengan universitas yang memiliki minat teknologi informasi dan komunikasi. Agar para dosen dan mahasiswa pada kampus tersebut dapat mengajarkan soal TIK ke sekolah-sekolah. Ada MKKS dan K3S, MGMP, dan MGBK yang dijadikan mitra strategis bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk kegiatan peningkatan mutu kompetensi kepala sekolah. Mustadi ingin melanjutkan program Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebelumnya (Ery Widaryana), di mana ada lomba praktik baik (*best practice*) pada beragam sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berupaya untuk mengadakan lomba jenis tersebut dengan memberikan apresiasi kepada mereka yang mampu meraihnya. Ada fenomena unik bahwa jabatan kepala sekolah terutama kepala sekolah SD sudah tidak diminati para guru lagi. Sehingga banyak jabatan Kepala Sekolah SD di Kabupaten Sleman yang masih kosong sampai sekarang. Kita pernah belajar ke Wonosobo, pulang kita implementasikan misalnya soal inovasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah mendorong dan memotivasi agar para guru siap menjadi kepala sekolah. Oleh karena itu Kepala Sekolah harus diapresiasi agar dapat termotivasi.

Mustadi mengingatkan bahwa saat ini mengalami fenomena di mana tren masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri minatnya cenderung terus menurun tiap tahun, terutama pada tingkat SD. Masyarakat sekarang berhak memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka sesuai pandangan dan kemampuannya. Pada satu sisi, sekolah negeri banyak yang tak dapat murid baru; pada aspek lain; ada sekolah swasta yang berdiri megah. Artinya bahwa masalah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Ketika sekolah negeri akan menyelenggarakan berbagai kegiatan, ingin bersaing dengan sekolah swasta yang maju membutuhkan biaya dan anggaran besar. Oleh karena itu Mustadi mendorong keterlibatan masyarakat orangtua atau wali murid ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kemajuan sekolah setelah melihat kondisi tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah menggandeng lembaga ombudsmen DIY; agar peran komite sekolah bisa optimal. Bagaimana agar peran masyarakat bisa berjalan dengan baik, apa yang bisa dilakukan dan bisa diterima dengan baik. Solusi tengahnya adalah penyelenggara bukan komite sekolah, melainkan paguyuban orang tua murid.

Arif Priyosusanto menekankan bahwa sampai sekarang SMP Negeri 4 Pakem dibuat sebagai sebuah *pilot project* bagi sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Sleman. Sebab semuanya sudah bermutu unggul. DPRD Kabupaten Sleman akan menghitung sesungguhnya untuk kebutuhan biaya pendidikan bagi para pelajar sampai lulus itu berapa rupiah di sekolah tersebut. Kalau angkanya sudah diketahui bersama, nilainya dapat ditetapkan sebagai standar pengelolaan keuangan daerah bidang pendidikan di Sleman. Kalau sampai tidak cukup untuk

mem-*back up* biaya standar tersebut, maka besarnya BOSDA akan digenjot untuk dinaikkan. Sehingga kualitasnya akan sama. Menyesuaikan ketentuan dengan kemampuan anggaran daerah. Tujuan utamanya yakni mengetahui dengan pasti jumlah kebutuhan 1 siswa dalam 1 tahun itu berapa biayanya. Kebijakan ini tentunya membutuhkan riset yang komprehensif. Bahkan seragamnya bahkan kalau bisa termasuk yang dibiayai, akan kita biayai; tapi belum bisa dilakukan karena regulasinya tidak membolehkan hal tersebut. Namun masih cita-cita. Harapan DPRD Kabupaten Sleman, sekolah negeri yang bersifat gratis, benar-benar harus gratis. Saat ini yang terjadi adalah bisnis pendidikan. Akhirnya uangnya masuk ke modal, yang berani mendirikan sekolah. Padahal tujuan pendidikan, adalah memberikan layanan pendidikan. Dulu ada retribusi pendidikan, tapi sekarang tidak ada lagi. Undang-undangnya sudah menghapuskannya.

Ponidi meminta kepada DPRD Sleman yaitu agar memberikan kesempatan yang luas kepada sekolah-sekolah negeri untuk berkreasi dan berinovasi tanpa batas. Sebab selama ini, seolah-olah sekolah negeri bergerak sedikit saja sudah disempit. Harapannya agar sekolah-sekolah negeri bisa memberikan kontribusi optimal. Biar semua pihak dapat berpartisipasi dengan baik, masyarakat juga bisa berkomunikasi langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan atau ke sekolah.

Dwi Warni Yuliasuti menegaskan bahwa peningkatan pelayanan mutu pendidikan dapat dilakukan juga melalui peningkatan kompetensi gurunya. Kebijakan tersebut menjadi penting. Misalnya para guru ketika mendapatkan penugasan sebagai apapun harus bisa dan siap. Termasuk ketika mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah. Mengingat saat ini masih banyak guru yang tidak siap dan tidak mau menjadi kepala sekolah.

5.2.2 Perspektif Para Kepala Sekolah di Kabupaten Sleman

Strategi yang dijalankan para kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) pada berbagai SD dan SMP se-Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Sleman, yaitu:

- Memperkuat pola pikir *growth mindset*, dengan berbagai pelatihan dan mengklarifikasi kepada siswa setelah pembelajaran melalui *google form*.
- Memaksimalkan komunitas belajar baik kepala sekolah maupun guru untuk pembinaan dan pembekalan guru dan kepala sekolah dalam implementasi *deep learning*.
- Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), membuat Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), mendorong guru melalui ruang guru GTK.
- Memfasilitasi internet bagi guru, memberikan fasilitas pendanaan, memenuhi kebutuhan buku.
- Memaksimalkan bimbingan teknis *deep learning* melalui pendanaan BOS kinerja (yang tidak mendapat BOS kinerja tidak mengikuti bimbingan teknis)
- Membangun budaya sekolah kolaboratif
- Memberikan apresiasi bagi para guru yang berprestasi.

Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, peran orangtua, serta peran implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Merujuk pada pendapat seluruh kepala sekolah yang menjadi narasumber riset ini menunjukkan bahwa:

- Kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi/kualitas guru, dan peran orang tua memiliki efektivitas dalam berkontribusi meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Hanya saja dibutuhkan pembuatan panduan standar kepemimpinan berkualitas agar dapat dituntaskan dengan baik.
- Roh pelaku kurikulum sejatinya terletak pada guru, maka kepala sekolah harus mampu meningkatkan kompetensi guru.
- Peningkatan kompetensi kepala sekolah dapat dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan dasar maupun tingkat lanjutan.
- Kebijakan yang ditempuh oleh kepala sekolah untuk memotivasi para pelajar dapat berprestasi secara akademik maupun non akademik, yaitu melalui:
- Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler
- Mengadakan festival kebudayaan, lomba cerdas cermat, siswa membuat program peningkatan mutu.
- Program disosialisasikan ke siswa dan orang tua, termasuk fasilitas pendanaan
- Melakukan audisi dalam pemilihan bakat dan minat.
- Mengadakan les atau bimbingan belajar
- Strategi peningkatan mutu, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa yang akan mengembangkan talentanya termasuk memberikan fasilitas bagi siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Membuat istilah-istilah yang menarik agar menarik dan memudahkan dalam pelafalan dan pengingatan.
- Menanamkan kepercayaan antar anggota *stakeholders*.

Kebijakan yang ditempuh oleh kepala sekolah untuk memotivasi para guru semakin profesional dan berprestasi, yaitu:

- Dengan menggunakan strategi keteladanan jika gagal menggunakan instrumen yang sedikit ekstrim.
- Dengan memberikan apresiasi kepada para guru berprestasi
- Pembiasaan doa bersama
- Pembekalan dan motivasi dengan narasumber dari eksternal
- Tertib dalam masalah administrasi.

Tingkat pemahaman para kepala sekolah mengenai substansi dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam ternyata masih sangat bervariasi. Fakta membuktikan bahwa pemahaman kurikulum dengan pendekatan *deep learning* bagi para kepala sekolah belum maksimal karena masih banyak yang belum mendapat pelatihan terkait hal tersebut.

Jumlah guru SD dan SMP yang sudah tersertifikasi pendidik saat ini ada 5.433 orang dan yang belum tersertifikasi sebanyak 6.341 orang (Satu Data Pendidikan Kabupaten Sleman, 2025). Upaya apa yang sudah dan akan dilakukan kepala sekolah untuk mendorong agar para guru yang

belum/tidak tersertifikasi ini bisa tersertifikasi menjadi guru profesional adalah dengan mengupayakan mereka mendapat Data Pokok Pendidikan/dapodik dan atau NUPTK.

5.2.3 Perspektif Para Guru di Kabupaten Sleman

Kepala Sekolah mengirimkan para guru untuk dapat mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan kurikulum berpendekatan pembelajaran mendalam, lalu mengimbaskannya ke para guru lainnya. Kendati kebijakan tersebut belum terlihat nyata hasilnya.

Menurut Martiyem, pengurus IGTKI Kabupaten Sleman, belum semua guru dan kepala sekolah khususnya TK yang mendapatkan pelatihan dalam kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Bahkan guru yang dikirim mengikuti pelatihan tersebut masih bersifat sukarela/mandiri. Pada tingkat Kelompok Kerja Guru (KKG) guru yang sudah pernah mendapatkan pelatihan terkait kurikulum dengan pendekatan mendalam melakukan pengimbasan terhadap guru lain yang belum pernah mengikutinya.

Menanggapi soal *deep learning*, para guru mengaku masih mengalami kesulitan karena masih bersifat umum terutama dalam pembelajaran mendalam, belum ada panduan operasional dan detail teknisnya. Penjelasan rinci terkait pembelajaran mendalam, cara memilih sesuai mata pelajarannya juga masih mengalami kesulitan. Butuh petunjuk teknis yang lebih konkrit untuk menerapkan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu masing-masing guru.

Sutrisno, salah satu guru pada sekolah di Kapanewon Gamping mengusulkan agar semua kepala sekolah berlaku bijaksana. Yang jadi masalah dalam implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam yakni para guru yang sudah mendapatkan pelatihan berhubungan dengan hal tersebut jumlahnya masih sedikit, bahkan belum menguasai sepenuhnya. Kalau dipaksakan mereka yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut untuk mengimbaskannya ke para guru lain yang belum pernah mengikuti pelatihan tersebut, tentu hasilnya tidak maksimal.

Akhirnya semua malah menjadi mengambang, sebab tujuannya menjadi tidak jelas. Pengimbasan ilmu "*Deep Learning*" belum merata pada tingkat guru dan pengimbas juga dinilai belum menguasai materi secara total/penuh. Sebaiknya para guru yang dapat mengikuti bimbingan teknis mengenai *Deep Learning* bukan hanya mereka yang mendapat BOS Kinerja, tetapi untuk semuanya.

Namun menurut Risna, salah satu guru SD di Prambanan mengungkapkan bahwa pada sekolahnya sudah ada Program Rabu produktif, di mana semua guru dibiayai untuk mengikuti pelatihan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam.

Menurut para guru yang menjadi narasumber dalam riset ini, pelatihan mengenai pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam belum intensif dan tidak menerima BOS Kinerja, sekolah melaksanakan komunitas belajar. Guru belajar secara mandiri, guru menjadi tidak greget, sebab tidak menemukan perbedaan dengan model pembelajaran sebelumnya. Maka perlu ada pengawasan atau supervisi lebih ketat lagi.

Guru harus menyesuaikan kembali dengan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan cara belajar secara *online*. Pemahaman terhadap kurikulum tersebut menjadi tergantung pada tingkat pemahaman guru masing-masing. Padahal guru sudah melaksanakan

substansi dari “*deep learning*”; tapi mereka kebanyakan tidak memahami bahwa mereka sudah melaksanakan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam.

Ternyata pada tingkat pelaksanaan pembelajaran mendalam, belum semua guru dinilai memahami dengan baik mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologis dari kurikulum berpendekatan pembelajaran mendalam. Dari FGD ditemukan pendapat bahwa tingkat pemahaman guru mengenai kurikulum tersebut masih berkisar 80 persen saja. Artinya belum sepenuhnya faham. Untuk itu para guru membutuhkan kemampuan analisis dan validasi apa yang sudah dilakukan selama ini. Tantangan terbesar justru perjuangan untuk mengubah cara pikir atau *mindset*--menjadi perkara yang paling lama dan sulit.

Kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam menilai proses pembelajaran, jadi anak seolah diluruskan atau dikoreksi hanya saat melakukan kesalahan saja. Padahal luaran atau hasil akhir juga penting untuk diperhatikan, karena itu menjadi penentu.

Adapun kendala yang menghambat pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam yakni soal *mindset*, perbedaan tingkat pemahaman mengenai pembelajaran mendalam.

Pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam pada tingkat PAUD dinilai mudah dilakukan, namun faktanya--dalam realisasinya; para guru mengimplementasikannya juga belum banyak yang paham benar. Peran guru untuk mendalami dan menerima penjelasan lebih lanjut mengenai substansi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam penting. Diharapkan ada pelatihan pembelajaran mendalam secara berkelanjutan. Peran orang tua juga menjadi masalah tersendiri, di mana mayoritas orangtua masih banyak menuntut soal baca-tulis-hitung menjadi skala prioritas utama dalam pembelajaran anak PAUD.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, para orangtua wajib dilibatkan dalam pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Hidayat, guru SD Negeri 1 Depok Sleman mengusulkan agar sekolah harus mempunyai tema/topik yang berbeda-beda setiap tahun sebagai bentuk inovasi untuk menarik minat banyak murid dalam SPMB. Kelas 1-6 terlibat langsung dalam proyek sesuai tema hingga tuntas. Sekolah dapat menggunakan berbagai potensi lingkungan lokal (sekitarnya) sebagai sumber belajar dalam kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam.

5.2.4 Perspektif Para Pengawas Sekolah di Kabupaten Sleman

Strategi dalam penerapan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) pada berbagai SD dan SMP se-Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Sleman.

1. Dengan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi sekolah-sekolah yang mendapatkan BOS Kinerja.
2. Pengimbasan dari sekolah yang mendapatkan BOS Kinerja kepada sekolah sasaran yang tidak mendapatkannya.

3. *In house training* tentang kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam bagi sekolah yang tidak mendapatkan BOS Kinerja, yang diadakan oleh Asosiasi Pengawasan Sekolah Indonesia (APSI) sebanyak 800 peserta (pengawas, kepala sekolah, dan guru semua jenjang) bertempat di Kemenag dan di SMA Negeri 1 Godean.
4. Pendampingan sekolah oleh pengawas, untuk jenjang SMP diperkirakan 80 persen sudah mendalami materinya mengenai pembelajaran mendalam.
5. Bimbingan teknis yang diselenggarakan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) DIY, pengawas SD 3 orang, pengawas SMP 3 orang, dan pengawas TK 3 orang.
6. Pemberdayaan komunitas belajar dan ruang guru sebagai upaya peningkatan kompetensi guru.

Efektivitas kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, peran orangtua, serta peran implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman.

- a) Kompetensi guru: pembelajaran masih penyesuaian yang baru, belum sepenuhnya mengimplementasikan pembelajaran mendalam secara tepat.
- b) Kepala sekolah: masih penyesuaian dengan peraturan yang baru.
- c) Peran orang tua: belum maksimal mendukung pembelajaran mendalam.

Peran pengawas sangat penting dalam mendukung terwujudnya kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman yang semakin baik. Namun jumlah pengawas sekolah di Kabupaten Sleman terbatas. Melihat masalah tersebut, jelas membutuhkan strategi yang dijalankan oleh para pengawas sekolah yang jumlahnya terbatas (minimalis) dalam menjalankan ketugasan pokoknya. Padahal ada ribuan lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman yang harus diawasi setiap hari.

- Langkah pertama, dengan mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMP dan melakukan pendampingan ke sekolah, supervisi di sekolah, monitoring implementasi pembelajaran mendalam, memastikan keterlaksanaan pembelajaran mendalam, dan penyusunan instrumen supervisi dan monitoring pelaksanaan pembelajaran mendalam.
- Langkah kedua, melakukan pendampingan ke satuan pendidikan dan komunitas belajar (guru dan kepala sekolah SD), *monitoring*, dan supervisi berhubungan dengan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam.

Berdasarkan hasil monitoring dan pengawasan para pengawas sekolah, strategi/cara efektif untuk meningkatkan mutu layanan dan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman ke depan, yaitu:

- a) Melalui pendampingan secara intensif, monitoring kepada kepala sekolah dan guru.
- b) Optimalisasi komunitas belajar, baik intra sekolah maupun lintas sekolah.
- c) Berbagi praktik baik kepala sekolah dan guru.
- d) Mendorong kepala sekolah dan guru untuk mengikuti kegiatan apresiasi guru dan tenaga kependidikan.
- e) Mendorong kepala sekolah dan guru belajar pada *platform* Ruang GTK.

Urgensitas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memperhatikan masalah peningkatan profesionalitas dan karir para pengawas sekolah di Kabupaten Sleman, sebab:

- a. Belum ada kegiatan peningkatan kapasitas pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- b. Apresiasi pengawas masih kurang diberikan termasuk perlu ada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) khusus bagi para pengawas sekolah.
- c. Perlunya ada kepastian kenaikan pangkat para pengawas sekolah ke jabatan Ahli Utama namun sampai sekarang belum ada analisis jabatan.
- d. Pengelolaan kinerja pengawas sekolah masih terkendala.

Seluruh pengawas sekolah dalam menjalankan tugasnya sama sekali tidak pernah mengalami ancaman, intimidasi, gangguan atau bentuk intervensi lainnya selama menjalankan tugas kepengawasan sekolah. Tingkat pemahaman para pengawas mengenai substansi dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam sudah bagus, namun menurut mereka masih perlu peningkatan dan penguatan lagi.

Menurut pengamatan dari para pengawas sekolah di Kabupaten Sleman, sampai sekarang, belum terlihat adanya peningkatan mutu pendidikan terkait dengan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam, mengingat masih dalam tahap proses pelaksanaan.

Jumlah guru SD dan SMP yang sudah tersertifikasi pendidik saat ini ada 5.433 orang dan yang belum tersertifikasi sebanyak 6.341 orang (Satu Data Pendidikan Kabupaten Sleman, 2025). Upaya yang sudah dan akan dilakukan kepala sekolah untuk mendorong agar para guru yang belum/tidak tersertifikasi ini bisa tersertifikasi menjadi guru profesional, yaitu:

- a. Mendorong para guru mengikuti PPG Dalam Jabatan bagi yang sudah masuk Data Pokok Pendidik (Dapodik).
- b. Mendorong para guru mengikuti PPG Pra Jabatan bagi mereka yang belum masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

5.2.5 Perspektif Para Pengurus Forum Komunikasi Komite Sekolah/FKKS (Orangtua Murid)

Strategi yang dijalankan para kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) pada berbagai SD dan SMP se-Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Sleman. Menurut Nuril (FKKS Kapanewon Prambanan), sekolah harus mengadakan uji publik kurikulum. Komite sekolah melihat bahwa dengan adanya kurikulum dengan pendekatan *deep learning* menunjukkan bahwa guru harus terus mengikuti kebijakan yang terus berubah. Tantangan justru terletak pada bagaimana membuat guru paham lebih dulu terkait kurikulum dengan pendekatan *deep learning*. Selama ini yang terjadi belum melihat strategi implementasi yang spesifik kecuali lewat proyek-proyek kecil di sekolah.

Menurut Pujo (FKKS Kapanewon Moyudan), komite sekolah memandang bahwa para guru sudah bagus dalam memahami kurikulum dengan pendekatan *deep learning*. Dirinya mencontohkan sebagaimana terjadi di SMP Kaliduren sudah ada *review* kurikulum juga. Pendapat lainnya dari Juno (FKKS Kapanewon Gamping), terkait penyelenggaraan kurikulum,

kepala sekolah harus menjadi inspirator dalam penyelenggaraan kurikulum. Kurikulum baru harus tetap mengikuti kebutuhan lokal terkait kebudayaan.

Suryati (FKKS Kapanewon Berbah) membeberkan bahwa kurikulum dengan pendekatan *deep learning* sudah berjalan dan sudah ada studi tiru yang dilakukan. Bambang (FKKS Kapanewon Kalasan) mengingatkan agar kebijakan terkait pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam harus diikuti dengan pendanaan yang memadai.

Faruk (FKKS Kapanewon Cangkringan) menekankan pentingnya membuat kekhasan bagi tiap sekolah seiring dengan adanya kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Selain itu juga penting untuk mengoptimalkan peran wali siswa. Harus ada konsep *parenting school* sebagai media sosialisasi dan memperkuat pengawasan oleh wali siswa. Bahwa setiap kurikulum harus meningkatkan adab/karakter/watak dari setiap siswa.

Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, peran orang tua, serta peran implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman.

Faruk (FKKS Kapanewon Cangkringan) mengungkapkan bahwa setiap guru berperan sebagai manajer dan diberi tanggung jawab mendalam kurikulum sesuai bidang masing-masing. Untuk itu harus ada komunikasi dengan orang tua/wali murid. Perlu juga pendampingan khusus ke siswa, baik di bidang akademik dan non akademik, sesuai hasil pemetaan sebelumnya. Menurut Bambang (FKKS Kapanewon Kalasan), peran kepala sekolah penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut.

Berhubungan dengan tingkat pemahaman mengenai substansi dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam, para orangtua atau komite sekolah mengaku sepakat bahwa masih sedikit orangtua yang paham dengan baik soal tersebut. Tentu hal ini sangat memprihatinkan bersama.

Kontribusi peran orang tua dalam kesuksesan melaksanakan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam yaitu:

- ✓ Orang tua berperan menyiapkan anak, termasuk dari sisi psikologis.
- ✓ Sebagian orang tua cuek dan sepenuhnya menyerahkan masalah pendidikan ke sekolah.
- ✓ Orang tua berperan dalam pendanaan agar sekolah bisa mengadakan acara-acara kreatif dan inovatif.

5.3 “Deret Ukur” Masalah Darurat dalam Dunia Pendidikan di Kabupaten Sleman

Fakta mengejutkan terlihat dari peta permasalahan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sleman. Adalah ketika tim riset meminta kepada para narasumber untuk menyajikan tiga masalah darurat dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sleman, justru yang diberikan jumlah masalah yang sangat banyak. Fakta ini membuktikan bahwa berbagai problematika pendidikan di Kabupaten Sleman sangat banyak kuantitasnya, dan membutuhkan jawaban atau solusi segera. Adapun “deret ukur” masalah darurat tersebut tersajikan sebagai berikut ini;

- ✓ Kompetensi guru yang harus dijaga dengan baik. Kalau dari sisi guru, perlu dijaga kompetensinya.

- ✓ Terkait pendidikan inklusi, mudah disebut tapi implementasinya sulit sekali di lapangan. Sebab kalau anak yang tingkat kecerdasannya rendah dicampur dengan anak yang kecerdasannya standar; pasti akan merugikan siswa lain; gurunya secara kesiapan mental juga kurang siap. Pemahaman orangtua harus dibuka kembali. Maka memang perlu adanya guru pendamping khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus pada sekolah-sekolah reguler, untuk mendukung program sekolah inklusi. Namun sampai sekarang, Sleman tidak mempunyai guru pendamping khusus tersebut. Masalah pendidikan inklusi memang pelik, masalahnya berhubungan dengan gurunya, sarana prasarana pendukung, dan faktor lainnya. Perlunya adanya peningkatan pendidikan inklusi, perlu adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD). Perlu adanya peningkatan tri pusat pendidikan; yang penting tidak mengganggu; perlu adanya dukungan dari luar sekolah juga terutama partisipasi dari masyarakat. Kalau perlu di sekolah ada CCTV yang terkoneksi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bisa langsung monitor terkait dengan kondisi seluruh sekolah di Sleman. Perlu juga penguatan peran masyarakat.
- ✓ Penambahan P3K paruh waktu perlu dilihat kembali efektivitasnya, sebab hal tersebut sangat membebani postur APBD. Salah satu penyebab adanya *refocusing*/rasionalisasi anggaran di Kabupaten Sleman karena adanya kebijakan P3K Paruh Waktu dan program MBG.
- ✓ Perlu ada pemerataan guru atau guru bantu. Solusi yang ditawarkan bisa dengan membuat perjanjian dengan universitas/ perguruan tinggi.
- ✓ Sekolah negeri cenderung kalah bersaing dengan sekolah swasta.
- ✓ Kekurangan guru dan pihak sekolah takut menarik dana bantuan untuk menggaji para guru.
- ✓ Masalah alokasi BOSDA jika bisa ditingkatkan jumlahnya. Mengingat sudah ada rencana adanya pemotongan BOSDA pada tahun 2026 ke depan.
- ✓ Masalah transportasi agar anak tidak menggunakan sepeda motor. Solusinya ada kerjasama antara pihak sekolah dengan kepolisian setempat.
- ✓ Etika siswa yang menurun seperti cuek/tidak peduli pada guru. Solusi yang ditawarkan adalah memperkuat pembelajaran nilai lokal (Pendidikan Khas Kejojagaan/PKJ) dan edukasi guru.
- ✓ Sekolah takut meminta iuran untuk mendanai kegiatan kreatif. Solusinya adalah dengan memainkan bahasa peraturan atau diksi. Misalnya bukan iuran tapi sumbangan sukarela dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan orangtua/wali dari murid. Peserta lain menambahkan bahwa di sekolahnya mekanisme penarikan sumbangan sukarela diadakan setelah ada komunikasi dengan paguyuban kelas dan penarikan sumbangan diadakan oleh dan atas nama paguyuban kelas.
- ✓ Penerapan pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam.
- ✓ Perencanaan pembelajaran guru
- ✓ Pengadministrasian asesmen sampai penilaian rapot.
- ✓ Masih banyak ditemui kasus *bullying* terhadap pelajar di sekolah

- ✓ Terdapat kasus sejumlah anak SD sampai tahun ke-3 tidak mau sekolah, sehingga tinggal di kelas (tidak bisa naik kelas) yakni berada di kelas 1 terus, sehingga putus sekolah. Masalah anak putus sekolah. Gagasannya, bisakah negara mengambil hak asuh anak tersebut, bisa atau tidak?
- ✓ Penerimaan siswa baru SMP khususnya bagi siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) agar dapat dimasukkan lewat zonasi. Ketika anak sekolah tidak bisa mengikutinya, di tengah jalan keluar, karena tidak bisa mengikutinya. Tidak ada keterangan bahwa anak tersebut merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (rekomendasi status anak normal/ABK).
- ✓ Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang akan dilakukan, komposisinya belum tahu seperti apa. Standar nilai rapot. Sekolah swasta cenderung mengunggulkan nilai karena sudah membayar lebih mahal.
- ✓ Pendidikan karakter. Dalam kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam ada 8 dimensi profil lulusan. Dilema hasil akademik dengan karakter. *Bullying* verbal masih cukup tinggi, korbannya terkadang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sekolah butuh bersinergi dengan orang tua. Sekolah ada program *parenting* dan jurnal harian untuk meminimalisir masalah karakter.
- ✓ *Bullying* di sekolah. Yang terkadang karena keluarga *broken home* (bercerai).
- ✓ Penggunaan gadget. Pengawasan gadget melalui kebijakan daerah.
- ✓ Agar ada yang mengadvokasi guru jika ada masalah menimpa mereka di lapangan. Karena posisi guru saat ini yang bisa dikatakan lemah, karena orang tua yang mudah melaporkan kepada aparat penegak hukum ketika mendapati anaknya dirugikan oleh pihak sekolah/guru.
- ✓ SD tidak ada petugas tata usahanya. Sehingga guru terpaksa harus bekerja ganda, menjadi petugas administrasi sekaligus menjalankan tugas sebagai guru kelas (*double job*). Pemerataan tugas guru, yang ditugaskan hanya guru-guru itu saja. Butuh bimbingan teknis yang berkelanjutan sesuai dengan fasenya.
- ✓ Urgensi perlindungan terhadap profesi guru agar tidak mudah untuk dilaporkan oleh orang tua. Supaya ada alur kebijakan dari pemerintah daerah, karena selama ini masih menjadi ranah inisiatif sekolah saja.
- ✓ Anak PAUD tidak terlayani karena krisis guru PAUD. Mengingat banyaknya guru nonformal yang memilih pindah ke guru formal. Sehingga butuh perhatian penuh untuk guru PAUD. Banyak guru PAUD non formal yang masih menerima gaji kurang dari 600 ribu per bulan.
- ✓ Sekolah selalu dituntut berbagai mutu, padahal mutu itu terbentuk tidak hanya di sekolah, peran lingkungan keluarga lingkungan bermain sangat berpengaruh.
- ✓ Kepedulian masyarakat terhadap perilaku anak masih sangat rendah.
- ✓ Beban kepala sekolah sangat berat, sebab tekanan masyarakat terutama dalam menertibkan siswa.
- ✓ Masalah kekurangan guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tidak mau membayar guru honorer pada sekolah negeri.

- ✓ Membatasi akses internet untuk di Kabupaten Sleman terhadap situs judi *online* dan pornografi, serta pornoaksi.

5.4 Tawaran Solusi Atasi Masalah Darurat dalam Dunia Pendidikan di Kabupaten Sleman

Berikut ini berbagai tawaran solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah darurat dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sleman, yaitu:

- ✧ Pemerataan terkait sosialisasi dan internalisasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam.
- ✧ Bimbingan teknis berkelanjutan berhubungan dengan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam.
- ✧ Pemerintah daerah menganggarkan untuk guru mata pelajaran agama selain (Pendidikan Agama Islam) dapat juga mengikuti PPG (guru di bawah Kemenag) ke depan tidak terjadi lagi.
- ✧ BOSDA dapat digunakan untuk memfasilitasi guru non PNS.
- ✧ Adanya kesetaraan untuk guru non formal dan guru formal, mendorong Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman untuk meningkatkan tunjangan fasilitasi seperti yang formal (jumlah fasilitasi yang diterima sama seperti guru formal), kesetaraan secara hukum perundang-undangan, serta kebijakan terkait Terhitung Mulai Tanggal/TMT (pemutihan TMT bagi guru non formal pindah ke guru formal).
- ✧ Ada instrumen menyeluruh tentang penilaian khusus untuk karakter anak. Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mendorong agar terbentuk tim guru penyusun instrumen penilaian agar memiliki target yang dibidik (regulasi mengenai instrumen penilaian pendidikan karakter).
- ✧ Sistem pendidikan supaya tidak berubah-ubah, agar ada transisi untuk guru dalam kebijakan kurikulum jika terjadi pergantian pemangku kebijakan supaya selalu siap dalam implementasinya.
- ✧ Melakukan pertemuan dengan orang tua secara periodik, melaporkan hasil belajar siswa yang baik maupun yang kurang baik.
- ✧ Pembatasan penggunaan media sosial dan sepeda motor oleh siswa
- ✧ Efektivitas guru wali dan pemanfaatan jurnal oleh orang tua
- ✧ Membuat program literasi baca tulis, dan diberikan apresiasi dan dipublikasikan dalam media massa maupun media sosial kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang literasi.

5.5 Kritisi dan Ide Publik untuk Meningkatkan Mutu dan Layanan Pendidikan di Kabupaten Sleman Sekarang dan ke Depan

Berikut ini ditampilkan daftar kritisi, masukan, saran, dan ide/pendapat yang disampaikan oleh berbagai pihak (pemegang kebijakan, kepala sekolah, guru, pengawas, dan komite sekolah)

untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Kabupaten Sleman sekarang dan ke depan, yaitu:

- ✓ UPT Kecamatan diberi anggaran khusus untuk mengundang komite sekolah supaya pertemuan komite bisa berjalan rutin.
- ✓ Kalau bisa semua komite sekolah masuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) dan lebih terorganisir.
- ✓ Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dimohon membuat masukan atau aturan terkait komite sekolah.
- ✓ Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah jangan terlalu lama menjabat karena Plt. tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Idealnya, maksimal dapat menjabat selama 3 bulan saja.
- ✓ Pembiayaan acara komite sekolah supaya komite sekolah tidak perlu keluar uang sendiri. Selama ini banyak pengurus komite sekolah yang lebih banyak “tombok” untuk membiayai kegiatannya.
- ✓ Peningkatan mutu pendidikan tidak boleh lepas dari konteks pemerataan.
- ✓ Harus dipastikan regulasi sudah terpadu.
- ✓ Harus ada pendekatan dengan nilai lokal terhadap kurikulum baru.
- ✓ Kepala sekolah harus memahami regulasi.
- ✓ Perkuat pendidikan karakter terutama di SD.
- ✓ Adakan pelatihan bagi guru.
- ✓ FGD perlu lebih sering lagi.
- ✓ Pendidikan harus menjadi kesadaran bersama.
- ✓ Harus ada komunikasi dan fasilitasi.
- ✓ Dalam FGD, agar bidang SD dan SMP jangan dicampur. Termasuk pemisahan Forum Komunikasi Komite Sekolah pada tingkat SD dan SMP.
- ✓ Ada sistem koordinator per kapanewon pada Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman.
- ✓ Anggaran BOSDA dinaikkan.
- ✓ Kompetisi guru ditingkatkan dengan acara atau kegiatan kreatif.
- ✓ Pengisian kepala sekolah jangan asal-asalan.
- ✓ Buat aturan yang sama antara sekolah negeri dan swasta.
- ✓ Pembangunan fisik sekolah mohon melibatkan komite sekolah, karena komite sekolah lebih paham terkait hal tersebut.
- ✓ Sosialisasi peraturan yang jelas ke kepala sekolah; sehingga kepala sekolah paham dan tidak takut melakukan terobosan.
- ✓ Adanya pendampingan hukum apabila terkait masalah yang berasal dari kurang pahamnya kepala sekolah terhadap kebijakan.
- ✓ Pemerintah Kabupaten Sleman diminta membuat terobosan regulasi agar lebih fleksibel dan tidak menyulitkan bagi komite sekolah.
- ✓ Lelang tender lebih terbuka dan obrolkan rencana pembangunan dengan komite sekolah.
- ✓ Akses pengajuan guru honorer lebih terbuka.
- ✓ Naikkan gaji guru dan tenaga honorer.

- ✓ Pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah sesuai dengan kebutuhan murid.
- ✓ Peningkatan profesionalisme dan karir guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
- ✓ Memenuhi kebutuhan guru kelas maupun guru mata pelajaran.
- ✓ Penambahan jumlah pengawas sekolah.
- ✓ Perlu adanya tambahan kesejahteraan dari daerah bagi pengawas sekolah.
- ✓ Kepala sekolah dan guru harus mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- ✓ Terpenuhi kebutuhan guru sesuai kompetensinya.
- ✓ Guru pada sekolah swasta yang pindah karena diterima sebagai P3K bisa kembali mengajar ke sekolah asal agar sekolah swasta tidak kekurangan guru.
- ✓ Menambah kuota fasilitasi.
- ✓ Ketepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- ✓ Keterlambatan kenaikan pangkat/jabatan.
- ✓ Mediasi guru dan orang tua.
- ✓ *Re-grouping* berbagai SD di Kabupaten Sleman.
- ✓ Mengawal BOSDA yang tidak diturunkan atau “dikurangi” proporsinya terkait adanya efisiensi.
- ✓ Mendukung kepala sekolah menjadi jabatan yang menarik.
- ✓ Model SPMB nilai rapot perlu ditinjau kembali.
- ✓ Bantuan suka rela yang aman.
- ✓ Pemenuhan kekurangan guru dana BOS tidak cukup untuk membayar guru.
- ✓ Kegiatan siswa di luar sekolah dan efektivitas pendidikan di masyarakat, sekolah, dan keluarga.
- ✓ Perjuangan agar para kepala sekolah mendapatkan tunjangan.
- ✓ Kepala Sekolah bisa mengangkat guru honorer.
- ✓ Melakukan advokasi bagi para guru dan kepala sekolah yang membutuhkannya.
- ✓ Memberikan apresiasi para guru dan kepala sekolah.
- ✓ Penempatan P3K/Paruh Waktu sesuai sekolah asal.
- ✓ Permendikdasmen Nomor 11/2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru khususnya penambahan jam yang tidak diakui perlu ditinjau kembali.
- ✓ Sistem 5 hari sekolah tetap berlaku.
- ✓ Perlu adanya rekrutmen atau penambahan tenaga administrasi pada SD.
- ✓ Kinerja melalui laman Kemendikbud perlu diperkuat dan disinergikan dengan kepentingan lainnya.
- ✓ Kejelasan mengenai *re-grouping* SD di Kabupaten Sleman.
- ✓ Peningkatan mutu kapasitas sekolah.

5.6 Efektivitas Kompetensi Guru, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Peran Orangtua, serta Peran Implementasi Pendekatan Pembelajaran Mendalam terhadap Mutu Pendidikan di Kabupaten Sleman

Merujuk pada bagian hasil dan temuan data serta pembahasan sebelumnya, dari riset ini dapat ditarik benang merah seperti di bawah ini.

Pertama, bahwa model kepemimpinan kepala sekolah memiliki efek/pengaruh yang paling besar derajatnya terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Di mana besarnya 33,3 persen. Kedua, bahwa kompetensi guru juga memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman, yang besarnya senilai 31,2 persen. Hanya terpaut/selisih angka 2,1 persen dengan variabel model kepemimpinan kepala sekolah.

Ketiga, peran orangtua ternyata juga memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Secara eksakta, pengaruhnya sebesar 21,1 persen. Keempat, peran implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman yakni sebesar 11,7 persen.

Kelima, model kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, peran orangtua, dan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam memiliki pengaruh sangat signifikan secara serentak (bersama-sama/simultan) terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Keenam, di luar 4 variabel di atas, masih terdapat faktor lainnya yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Namun faktor-faktor tersebut tidak dilakukan penelitian. Adapun besarnya faktor-faktor lain di luar 4 variabel yang diteliti dalam riset ini yang turut berpengaruh terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Sleman besarnya 11,8 persen.

Jadi simpulan utama dalam riset ini yakni: model kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, peran orangtua, dan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam memiliki pengaruh sangat signifikan secara serentak (bersama-sama/simultan) terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman.

Pengaruh implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam tergolong yang paling kecil jika disandingkan dengan 3 variabel lainnya, karena beberapa argumentasi logis. Dalihnya karena para pemahaman mengenai substansi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam di antara para responden memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Responden kelompok orangtua merupakan mayoritas responden yang tingkat pemahamannya paling rendah. Disusul para guru yang ternyata masih sedikit guru yang bisa mengikuti bimbingan teknis atau kegiatan sejenis terkait pemahaman dan penerapan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Pada tingkat kepala sekolah saja, belum semua

kepala sekolah di Kabupaten Sleman mengikuti kegiatan bimbingan teknis tersebut. Bahkan dari mereka yang mengikutinya mengaku belum cukup memahaminya dengan baik.

Para pemegang kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Sleman--mengklaim telah melakukan kegiatan sosialisasi secara intensif mengenai kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam ke seluruh sekolah. Ternyata faktanya, masih banyak guru, orangtua, bahkan sebagian kepala sekolah yang belum memahami secara utuh mengenai kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Dari hasil FGD juga diketahui bahwa, para pengawas sekolah juga mengaku belum bisa melihat dampak dari implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam terhadap mutu pendidikan; mengingat pelaksanaan kurikulum tersebut masih dalam proses. Bahkan para pengawas sekolah sendiri juga tetap meminta untuk tetap diberikan bimbingan teknis secara berkelanjutan berhubungan dengan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam, kendati mereka sudah cukup memahaminya.

Dibutuhkan strategi jitu untuk memahami substansi dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam di kalangan guru, kepala sekolah, orangtua, termasuk para pelajar. Tanpa adanya pemahaman yang memadai dari para pelakon tersebut, pengaruh implementasi kurikulum terhadap peningkatan mutu pendidikan akan stagnan atau tidak mengalami perubahan signifikan. Strategi lainnya yakni perlunya dukungan infrastruktur berupa teknologi, sebab pintu masuk kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam yakni melalui koding. Guru SD dan SMP yang secara khusus memiliki kompetensi bidang perkodingan, masih minimalis; maka dibutuhkan SDM baru yang memiliki kompetensi ini. Memang banyak lulusan Sarjana Ilmu Komputer maupun Informatika, belum tentu memiliki minat untuk menjadi guru SD dan SMP.

Pada aspek lain, pembelajaran koding hanya bisa dipelajari langsung secara efektif dengan bantuan Telematika. Tersedianya akses internet, gadget berupa laptop, komputer, smart phone, smart TV, maupun notepad menjadi pendukung penting untuk hal tersebut. Sementara ini masih banyak lembaga pendidikan di Sleman yang tidak memiliki dukungan SDM dan infrastruktur Telematika yang memadai untuk mendukung keberlangsungan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Adanya jaminan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan SDM guru yang memiliki kompetensi bidang perkodingan, sekaligus tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai di berbagai sekolah di Kabupaten Sleman bakal memudahkan pelaksanaan kurikulum tersebut.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dalam pembahasan di atas, kesimpulan besar dari penelitian ini sebagaimana tercantum di bawah ini.

Pertama, model kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, peran aktif orangtua, dan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam memiliki pengaruh sangat signifikan secara serentak (bersama-sama/simultan) terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Model kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif, kreatif, dan progresif; serta peran kompetensi guru yang memiliki 4 kompetensi utama (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian) memiliki pengaruh yang paling besar jika dikomparasikan dengan pengaruh faktor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah harus lebih diprioritaskan pada upaya yang lebih masif dan kohesif. Nasib kesejahteraan para guru, kepala sekolah, termasuk para pengawas sekolah relevan untuk diperhatikan, mengingat profesionalitas guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah salah satunya dipengaruhi juga oleh kesejahteraan mereka. Apalagi adanya temuan fakta dalam penelitian ini ditemukan mayoritas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) non formal yang gajinya tiap bulan hanya Rp 600.000 sampai dengan Rp 1.500.000 per bulan. Perlu upaya lebih giat lagi untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Masih banyaknya guru di Kabupaten Sleman yang gajinya di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sleman tahun 2025 menjadi “pekerjaan rumah” yang harus segera dituntaskan di masa kini dan yang akan datang.

Kedua, strategi taktis yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman dilakukan dengan berbagai strategi. DPRD Kabupaten Sleman memberikan dukungan pendanaan rata-rata dalam jumlah Rp 900 miliar kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman per tahun. Anggaran tersebut sebagian besar terserap untuk pembiayaan gaji pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bahkan sampai lebih dari 50 persen. Anggaran yang diplot DPRD Kabupaten Sleman untuk dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memang sudah terbilang besar jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kabupaten Sleman. Meski sudah besar, angka di atas belum sesuai mandatori Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1, di mana dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara intensif telah melakukan pendampingan, sosialisasi, dan bimbingan teknis implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam kepada para kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Namun efektivitas program pendampingan, sosialisasi, dan bimbingan teknis tersebut sampai sekarang belum optimal. Karena masih terdapat kepala sekolah, guru, termasuk orangtua/komite sekolah yang belum memahami dengan baik dan benar esensi dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman harus membuat terobosan inovatif dan kreatif untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam tersebut ke seluruh *stakeholder* melalui beragam cara dan media. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan kesejahteraan guru di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman sudah berusaha untuk pemerataan mutu pendidikan dengan upaya menghilangkan adanya sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Langkah ini penting ditempuh untuk memberikan perlakuan sama dan adil kepada semua sekolah sehingga mutu pendidikan bisa merata dan semakin baik. Sinergisitas (kerjasama, komunikasi, dan koordinasi) sudah baik dilakukan antara DPRD Kabupaten Sleman melalui Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, Bupati Sleman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, orangtua murid, dan pihak-pihak lainnya.

Para kepala sekolah sebagai pemimpin pada satuan pendidikan masing-masing sudah memberikan keteladanan kepemimpinan yang baik dalam pengimplementasian kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Mereka sangat aktif dalam memberikan apresiasi kepada para guru termasuk pelajar yang berprestasi. Para kepala sekolah juga giat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan para orangtua/wali dan lembaga luar untuk meningkatkan dan pemerataan mutu sekolahnya masing-masing. Hanya saja pada tingkat SD, ditemukan banyak guru yang tidak tertarik/minat menjadi kepala sekolah. Akibatnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman cukup kesulitan untuk mencari pengganti kepala sekolah yang sudah masuk usia pensiun. Untuk itu perlu strategi agar jabatan kepala sekolah menjadi impian bagi karir para guru ke depan.

Para guru, pengawas sekolah, dan orangtua/wali murid (melalui komite sekolah) telah berperan aktif dalam berkontribusi meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai upaya meningkatkan kompetensi guru profesional, pengawas sekolah intensif melakukan supervisi ke berbagai sekolah sehingga menjadi sekolah unggul. Para orangtua melalui komite sekolah telah membentuk Forum Komunikasi Komunitas Sekolah (FKKS) baik pada tingkat kapanewon dan kabupaten (sejak tahun 2023) yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan kerjasama antar orangtua murid untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman. Eksistensi komite sekolah yang tergabung dalam FKKS kapanewon maupun kabupaten harus juga difasilitasi oleh pemerintah daerah, terutama melalui Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman sehingga semakin optimal keberadaannya bagi kemajuan sekolah masing-masing.

6.2 Rekomendasi/Saran

Ada tiga model saran yang direkomendasikan dalam riset ini, yakni saran birokratis/praktis, saran akademis, dan saran sosial-kemasyarakatan.

Pertama, saran birokratis/praktis. Saran ini ditujukan kepada Bupati Sleman selaku pemangku kepentingan tertinggi di Kabupaten Sleman. Riset ini menghasilkan kesimpulan penting berhubungan dengan masa depan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Bahwa pemahaman utuh mengenai esensi dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam belum dikuasai sepenuhnya oleh para kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, pelajar, dan para orangtua/pengurus komite sekolah. Untuk itu seluruh kepala sekolah dan guru wajib terlebih dahulu memahami dengan baik esensi pokok dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Perlu berbagai program dan inovasi yang bisa digagas oleh Bupati Sleman agar implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam tersebut bisa berjalan dengan baik. Riset ini merupakan bagian tak terpisahkan dari *monitoring* (pengawasan) dan “evaluasi” atas pelaksanaan dari kurikulum tersebut, di mana mengingat pelaksanaan kurikulum tersebut masih dalam tahap awal di Kabupaten Sleman. Program yang relevan untuk digagas pada tahun mendatang yakni pemberian penghargaan kepada para kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan komite sekolah, serta tokoh masyarakat yang berprestasi dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam tersebut. Usulan tim riset, penghargaan terhadap berbagai kalangan yang berprestasi luar biasa dan punya kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Sleman bisa diprakarsai oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam program “Dewan Pendidikan *Award*”--yang bisa dilakukan setiap akhir tahun.

Bupati Sleman juga harus menjamin mengenai ketersediaan dan keterpenuhan anggaran pendidikan agar sesuai dengan mandatori dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1. Adanya rencana rasionalisasi Anggaran Raperda Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2026 Pasca Penurunan Dana Transfer Daerah yang tercantum dalam RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sampai lebih dari Rp 65 miliar (sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor: 910/13822 tentang Penjelasan Rasionalisasi RKA 2026 per 28 Oktober 2025); sebaiknya harus ditinjau ulang (segera). Karena tim riset Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman meyakini jika rasionalisasi anggaran kembali terjadi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada tahun 2026; bahkan sampai mengepras pagu anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Sosial (BANSOS) PAUD, SD, dan SMP, PKBM Tahun 2026, dapat dipastikan mutu pelayanan publik bidang pendidikan akan terganggu dan berpotensi menurunkan kualitas/mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Padahal tantangan zaman dan masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di

Kabupaten Sleman semakin kompleks dan membutuhkan program kerja inovatif, kreatif, dan pengawalan yang ekstra ketat.

Saran/rekomendasi birokratis kedua ditujukan kepada DPRD Kabupaten Sleman agar selalu memprioritaskan bidang pendidikan dalam membangun “*master plan*” Sleman pada tahun 2045. Bidang pendidikan merupakan entitas dari upaya pemerintah untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset utama Kabupaten Sleman yang menjadi motor penggerak dalam berbagai bidang kehidupan. Pemberian kepastian “politik anggaran” yang memadai kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Selain itu juga memperkuat eksistensi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dengan cara penguatan anggaran yang memadai sekaligus penguatan kewenangannya. DPRD Kabupaten Sleman harus selalu memberikan dukungan hukum agar Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman benar-benar bisa mandiri baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun kewenangannya--sebagaimana amanah Undang-Undang.

Saran/rekomendasi birokratis ketiga ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman agar optimal dan komitmen dalam pemerataan mutu pendidikan pada sekolah-sekolah yang masih minim sarana dan prasarana. Nasib kesejahteraan guru baik PTK formal maupun non formal berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman harus berjuang keras untuk menjamin kesejahteraan setiap guru (formal maupun non formal, negeri maupun swasta). Mengingat masih banyak guru yang gajinya di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sleman 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dapat berinisiatif membuat program-program yang dapat terus meningkatkan profesionalitas guru sekaligus kesejahteraan hidup mereka. Khusus untuk implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga harus “*all out*” mengerahkan seluruh sumber daya manusianya dan sumber dana, sekaligus sumber daya teknologinya untuk mengawal secara ketat proses perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, *monitoring* sampai tahap evaluasinya. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman harus membuat program-program khusus dan inovatif yang dapat membuat pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam bisa mudah diadaptasi dan diterapkan pada sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman dengan sasaran seluruh kepala sekolah dan guru se-Kabupaten Sleman. Termasuk dengan melibatkan pengawas sekolah, orangtua/wali murid, dan para pelajar itu sendiri.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan menggandeng OPD lain maupun lembaga lainnya juga harus berkomitmen untuk menyediakan berbagai fasilitas teknologi Internet “*super cepat*” pada setiap sekolah dan mendukung penyediaan gawai (laptop, komputer, *notepad*, *smart box*, TV pintar, dan teknologi pembelajaran lainnya) yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Karena pintu masuk dari pengembangan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam yakni terletak pada koding yaitu kemampuan untuk membaca, menyeleksi data dalam jumlah besar (*big data*)

melalui bantuan kecerdasan manusia (otak) dikombinasikan dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligent*). Penyediaan guru-guru yang memiliki kecakapan mumpuni dalam bidang perkodingan; menjadi kebutuhan mendesak di masa kini dan yang akan datang. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah harus membuat peta jalan untuk mengatasi kebutuhan dalam bidang pendidikan tersebut.

Kedua, saran akademis/teoritis. Tim riset menyarankan agar hasil riset ini dapat memberikan dampak optimal terhadap pengembangan teori pada bidang ilmu pendidikan (khususnya pada manajemen/tata kelola kurikulum dan sumber daya manusia untuk pendidikan unggul); maka tim riset menyarankan agar ada penelitian lanjutan dari riset ini. Adapun celah riset yang bisa dieksplorasi peneliti lainnya yakni berhubungan dengan isu evaluasi pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam minimal setelah 1 tahun ajaran penuh pada tahun 2026. Evaluasi kurikulum, sebaiknya juga dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali untuk dapat memperbaiki pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam tersebut. Peluang isu lain yang bisa dilakukan riset lanjutan yakni berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia (SDM) kepala sekolah dan guru. Berbagai hambatan, tantangan, dan penyebab adanya tren mengapa banyak guru di Kabupaten Sleman yang tidak berminat menjadi kepala sekolah, relevan untuk dicari penyebab utamanya. Yang perlu diriset selanjutnya yakni berhubungan dengan standar biaya minimal yang dibutuhkan oleh pelajar SD dan SMP di Kabupaten Sleman sejak masuk sekolah sampai lulus dengan kualitas unggul. Melalui berbagai rencana riset lanjutan tersebut akan sangat bermanfaat dalam membantu berbagai pihak (mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Sleman, kepala sekolah, guru, dan pihak-pihak lainnya) dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dengan baik dari hulu sampai hilir berhubungan dengan tata kelola dan strategi membangun arsitektur pendidikan yang ideal di Kabupaten Sleman.

Penting juga dilakukan di masa mendatang yaitu melakukan penelitian lanjutan atas riset untuk mengevaluasi ketercapaian 8 standar nasional pendidikan (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan, dan standar pembiayaan) khususnya pada berbagai sekolah di Kabupaten Sleman. Tentu saja rencana tersebut merupakan langkah besar dan taktis, mengingat dengan mengetahui secara pasti nilai masing-masing standar yang dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan; akan memberikan hasil optimal kepada lembaga pendidikan terkait untuk segera melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan mutu atas 8 standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan tersebut. Targetnya, seluruh lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman bisa berkualitas unggul ke depan.

Ketiga, rekomendasi/saran secara sosial kemasyarakatan, tim riset ini menyarankan agar para orangtua/wali murid, masyarakat, maupun publik memiliki kesadaran tinggi untuk berkontribusi dalam menyukseskan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Hal ini sangat penting dilakukan karena banyak masyarakat yang selama ini bersikap “apatis” dengan

adanya perubahan kurikulum yang terjadi secara berkala ketika terjadi pergantian kekuasaan (pergantian menteri). Peran masyarakat dalam ekosistem pendidikan model “*octahelix*” sangat penting sebab menjadi pihak yang akan mempengaruhi kuat ke manakah anak-anak mereka akan disekolahkan. Masyarakat juga seharusnya memiliki sikap kritis terhadap para pemegang kebijakan bidang pendidikan mulai dari presiden, menteri, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Sikap kritis tersebut penting dijaga untuk menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan; sehingga setiap kritik yang dilancarkan masyarakat dapat memperbaiki tata kelola pendidikan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya Fitriani dan Santiani. (2025). Analisis Literatur: Pendekatan Pembelajaran Deep Learning dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Vol. 2 No. 3 Mei 2025. klik: <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/4357/3850>
- Andi Nur Isnayanti¹, Putriwanti, Kasmawati, Rahmita. (2025). Integrasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dalam Kurikulum Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang.
- Bush, T., & Ng, A. Y. M. (2019). Distributed leadership and leadership development in schools: Perspectives from Singapore. *School Leadership & Management*, 39(5), 434–451.
- Chika Rahayu, Hanifah Zakiya, Ryna Aulia Falamy, Muhammad Ubaidillah, Yanuar Dwi Prastyo, Lintang Fitra Utami, Desrina Hardianti, Rani Yosilia. (2025). Sosialisasi Pendekatan Pembelajaran Mendalam / Deep Learning di Era Digital bagi Guru di Indonesia. Institute of Research and Publication Indonesia
- CJPE: Cokroaminoto Journal of Primary Education <https://e-journal.my.id/cjpe> Volume 8| Nomor 2| Juni|2025e-ISSN: 2654-6434 dan p-ISSN: 2654-6426. klik: <https://e-journal.my.id/cjpe/article/view/6027/4127>
- CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Journal Homepage: <https://journal.irpi.or.id/index.php/consen> Vol. 5 Iss. 1 Mei 2025, pp: 64-69
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140.
- Epstein, J. (2011). *School, Family, and Community Partnerships*. Routledge.
- Fullan, M., & Langworthy, M. (2014). *A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning*. Pearson.
- Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2018). *Deep learning: Engage the world, change the world*. Corwin Press.
- Hidayat, M., & Sulisty, T. (2019). Implementasi tes kemampuan akademik dalam pemetaan mutu siswa. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 145–158.
- Hornby, G., & Blackwell, I. (2018). Barriers to parental involvement in education: An update. *Educational Review*, 70(1), 109–119.
- I Ketut Suar Adnyana. (2024). Implementasi Pendekatan Deep Learning dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Retorika* Vol. 5 No.1 Juni 2024 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Flores. Klik: <https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/RJPBSI/article/view/5304/2781>
- Kemendikbudristek. (2022). *Rencana Strategis Pendidikan 2020–2024*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Pembelajaran mendalam: Menuju pendidikan bermutu untuk semua. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Khairul Amri dan Fitri Adifa. (2025). Pendekatan Pembelajaran Mendalam: Potensi dan Tantangannya pada Pendidikan Indonesia. ESCC RESEARCH: Education Science and Cross Culture Journal. SIBER Nusantara Publisher. Klik: <https://siberresearch.org/ESCC/article/view/19/19>

Leithwood, K., & Jantzi, D. (2006). Transformational School Leadership. *Educational Administration Quarterly*.

Levin, B. (2017). *Education policy: Evidence, politics and practice*. Routledge.

Moh. Khoerul Anwar. (2017). Pembelajaran Mendalam untuk Membentuk Karakter Siswa sebagai Pembelajar. *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah* 02 (2) (2017) 97-104 e-ISSN: 2579-7964 DOI: 10.24042/tadris.v2i2.1559. klik: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55599796/Pembelajaran_Mendalam_untuk_Membentuk_Karakter_Siswa_sebagai_Pembelajar-libre.pdf?1516600204=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPembelajaran_Mendalam_untuk_Membentuk_Ka.pdf&Expires=1759141778&Signature=ahXpd1Ohx-uKf0Ywive37qc0PIi9B6Y7yUMLJ5ee9fEc-S6BcNF3EVtYtB9xzjTsiDdVBcXqO4499oiKMUxvXZKevapxlHrh6G72LDQe9SS1MLA802nMswNlrYDWePUwIQwm2gO46OsRtHWyUkfODt~NvEQRWt-iObyKO5bhhWE4wUfGeXBuAraEo4DKrtjTnjWIHSMH-VG5xnCkXUQAMWVF8jxYkFLe4X268SAjcSti8VNZFRzw1YILR6K9GVI-HpusXc8brnuP~k0SBShsS9rsqRjyAAn6MOovafD3MfUclUDEFrZbmbaElewNiGbBqWYX6OtE1HShm~s8VVGagQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Nur Kharisma, Diva Erlina Septiani, Feby Suryaningsih, Mahdum, Erlisnawati. (2025). Transformasi Pembelajaran Bermakna melalui Deep Learning: Kajian Literatur dalam Kerangka Kurikulum Merdeka. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*-ISSN 3026-2917<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZynp>-ISSN 3026-2925Volume 3Nomor 3,2025DOI:<https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1462>. klik: <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1462/86>

OECD. (2021). *Teachers and Leaders in Schools: TALIS 2018 Results (Volume II)*. OECD Publishing. P-ISSN: 2828-9943 E-ISSN: 2809-0217.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Prastyo, E., & Sumarni, W. (2020). Kompetensi guru abad 21 dalam pembelajaran berbasis literasi digital. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(1), 45–54.

Schleicher, A. (2019). *PISA 2018: Insights and Interpretations*. OECD Publishing.

Supadiyanto. (2025). Transformasi, Digitalisasi, dan Sinergisitas Ekosistem Pendidikan Model “Oktahelix” untuk Mewujudkan Mutu Pendidikan Mutu Pendidikan Unggul di Kabupaten Sleman. Makalah pada Seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman 2025.

Suwandi, Riska Putri, Sulastri. (2023). Inovasi Pendidikan dengan Menggunakan Model Deep Learning di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)* Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 69-77 E-ISSN: 3025-9843. klik: <http://kurniajurnal.com/index.php/jpkp/article/view/211/515>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Utami, F. N. (2021). Tes kemampuan akademik sebagai instrumen pemetaan kualitas pendidikan. *Jurnal Asesmen Pendidikan*, 5(1), 33–42.

World Bank. (2021). *Learning losses in COVID-19 crisis: Policies to protect and promote education*. Washington DC: The World Bank.

Yamin, M., & Syahrir. (2020). Pendidikan bermutu berbasis evidence-based policy. *Jurnal Pendidikan dan Kebijaksanaan*, 7(2), 87–96.

Yeni Nuraeni, Al gifari, Alicia Ivanna, AlyaAtsa, Radita Maharani. (2025). Peran Guru dalam Menerapkan Strategi Deep Learning untuk Meningkatkan Berfikir Kritis Siswa SD.

Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu> Vol.
4, No. 3 Juli 2025 P-ISSN:2964-7142; E-ISSN:2964-6499. klik:
<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/2824/2492>

LAMPIRAN

NOTULENSI FGD DEWANDIK SLEMAN: STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SECARA KOMPREHENSIF DI KABUPATEN SLEMAN

Hari/Tanggal : Rabu, 19 November 2025

Tempat : Ruang Pangripta Bappeda Sleman

Acara : FGD Riset Dewandik Sleman

Peserta : 120 orang

Daftar Hadir :

- Ketua Komisi D DPRD Sleman Arif Priyosusanto, Kadisdik Sleman Mustadi, Kabid Pembinaan PTK Disdik Sleman Dwi Warni Yuliasuti, Kabid Pembinaan SMP Disdik Sleman Ponidi, Tenaga Ahli Bupati Sleman bidang Pendidikan Litha Ristiyati.
- Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman: Ery Widaryana, Supadiyanto, Arif Bintoro Johan, Sutarta, Joko Sutikno, Eko Priyo Agus Nugroho, Sri Lestari, Galuh Setia Winahyu, Syaiful Cahyadi, dan Marietta D. Susilawati. Izin: Ariyanto Nugroho.
- 120 peserta terdiri dari para kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengurus HIMPAUDI dan IGTK Kabupaten Sleman.

Pada kesempatan tersebut, Kadisdik Sleman yang dalam sambutannya diwakili oleh Dwi Warni Yuliasuti memberikan apresiasi besar terhadap riset yang digagas oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman untuk menemukan strategi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman secara komprehensif. Riset tersebut dipandang penting agar dapat memberikan terobosan kebijakan dalam bidang pendidikan sehingga Sleman selalu menjadi yang terdepan. Hal tersebut sesuai dengan visi Bupati Sleman yakni: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban. Pada kesempatan tersebut diharapkan agar para peserta FGD bisa menyampaikan gagasannya sehingga dapat dijadikan bahan rekomendasi strategis agar visi tersebut bisa sukses untuk terwujud selama 5 tahun ke depan.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Ery Widaryana memberikan pengantar riset. Dirinya menyatakan bahwa salah satu tugas Utama Dewan Pendidikan adalah memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah berhubungan dengan kebijakan pendidikan di Kabupaten Sleman. Penelitian yang kini sedang dilakukan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sleman secara Komprehensif merupakan bagian dari ketugasan tersebut. Kami mengundang seluruh stakeholder bidang Pendidikan terdiri dari para pemangku kepentingan dari DPRD Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Tenaga Ahli Bupati Sleman, para kepala sekolah SD dan SMP, para guru, para pengurus komite sekolah, dan para pengurus HIMPAUDI serta IGTK Kabupaten Sleman untuk mendapatkan data-data yang akurat dan kompetibel. Sebelumnya kami sudah mengedarkan sejumlah kuisioner kepada ratusan responden terpilih. Hasilnya ribuan responden telah mengisi kuisioner tersebut. Hal tersebut di atas ekspektasi dari tim riset. Antusiasme masyarakat dalam mengisi kuisioner cukup tinggi kendati ada sejumlah responden di dua kapanewon yakni

Cangkringan dan Ngemplak khususnya dari Guru SD yang tidak ada mengisi kuisioner tersebut. Saat ini semua data masih kami olah dan akan dikombinasikan dengan hasil data FGD pada hari ini.

Sedangkan Eko Priyo Agus Nugroho selaku koordinator mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari para responden yang sudah mengisi kuisioner dan juga peserta FGD. Saat ini data kuantitatif masih diolah oleh tim riset, di mana akan kami sajikan hasilnya kepada publik setelah hasilnya tuntas. Secara substansial, riset ini dilatarbelakangi adanya perubahan besar-besaran dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan perubahan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. Adanya berbagai perubahan tersebut tentu berdampak pada kualitas mutu pendidikan.

Jumlah sekolah yang dijadikan sampel riset yang erpilih sebanyak 246 SD dan SMP se-kabupaten Sleman. Terdiri dari 194 SD dan 48 SMP, 373 guru, 399 orangtua, 399 siswa. Sementara jumlah responden yang sudah mengisi kuisioner sebanyak 204 kepala sekolah, 374 guru, 1.045 guru, dan 1.263 pelajar.

Arif Priyosusanto Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman menyoroti masalah pentingnya bukan saja peningkatan mutu, tapi juga masalah pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Pemerataan peningkatan kualitas mutu dan peningkatan mutu menjadi masalah priorotas di Sleman. Agar semua sekolah bisa menjadi sekolah favorit, agar ada pemerataan kualitas/mutunya. Melalui peningkatan anggaran, pendampingan guru, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Melalui kebijakan DPRD Kabupaten Sleman akan sama yakni mendukung kebijakan Bupati Sleman. Kalau untuk anggaran sejak dulu sudah sesuai dengan perintah Undang-Undang; memang paling besar untuk biaya gaji guru dan tenaga pendidikan. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Sleman mempunyai sekolah terbanyak. Beda dengan Kota Yogya, Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul.

Kami ingin di Sleman kondisi bangunannya bagus. Agar sekolah tidak terganggu karena adanya bangunan yang rusak. Termasuk BOSDA adalah salah satu yang menyedot anggaran pendidikan. Selama 5 tahun, kita komitmen utuk dinaikkan tiap tahun, namun dengan klasifikasi tertentu. Agar BOSDA tepat sasaran. Sekolah yang kaya dan elit itu kita kurangi BOSDA-nya, sebab mereka sudah dapatkan BOSNAS. Kecuali kalau sekolah elit tersebut menerima murid yang tidak mampu, maka mereka juga berhak diberikan BOSDA penuh juga. Untuk insentif guru tetap tidak dikurangi. Bidang pengawasan, kami melakukan monitoring, tiap kapanewon bagaimana jalannya pendidikan di Sleman. DPRD Kabupaten Sleman meminta masyarakat yang menemukan adanya kejanggalan bidang pendidikan, bisa langsung melaporkannya ke DPRD Kabupaten Sleman. Jangan hanya diviralkan, yang justru membuat masalah menjadi ke mana-mana dan tidak selesai.

Berikut ini ringkasan intisari FGD riset dengan peserta para penentu kebijakan bidang pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Sleman, dan Tenaga Ahli Bupati Bidang Pendidikan)

Kabid Pembinaan Bidang SMP Ponidi:

Untuk mendukung kebijakan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam, Sleman telah melakukan sinkronisasi antara program pusat dan daerah. Disdik Sleman juga sudah memberdayakan MKKS, K3S, MGMP dan guru BK. Ada tim inti juga yang sudah dilatih oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dapat berimbas ke teman-teman dan masyarakat. Kita diuntungkan banyak personil dari DIY yang terlibat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menangani hal tersebut. Selain lembaga pendidikan, secara personal kita kenal dengan baik para narasumber tersebut.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam yakni: pertama, adanya paradigma atau mind set yang tidak mau berubah. Kedua, kalau di sekolah guru-guru melaksanakan pembelajaran, mereka terpaksa harus meninggalkan tugas untuk melaksanakan pelatihan. Bagi sekolah kecil, itu menjadi masalah, sebab gurunya yang jumlahnya sedikit ikut pelatihan; kelas menjadi kosong. Bahkan untuk sekolah yang besar saja masih menjadi masalah, masih sering adanya kelas yang kosong, karena terdapat sejumlah guru yang mengikuti pelatihan kurikulum dengan pembelajaran mendalam.

Dwi Warni Yulastuti: Disdik Sleman juga menguatkan dari sisi teknis pelaksanaannya. Karena untuk melaksanakan implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam sudah ada panduan secara nasional, namun dalam tataran operasional tergantung pada kebijakan masing-masing daerah.

Tahun ini, jatah PPG ada 600.000 untuk kuota pusat. Namun ada yang tak bisa karena sakit, melahirkan, dan lain-lain. Disdik akan melakukan inventarisasi guru yang belum terpanggil. Terkait dengan kuota, kita diberikan kuota dengan jumlah terbatas. Namun kami belum mengecek data, tahun ini ada berapa guru di Sleman yang mengikuti PPG dan lulus kegiatan tersebut.

Mustadi: untuk mengimplementasikan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam di Sleman adalah sebuah tantangan. Kurikulum tersebut dapat terinternalisasi kepada anak-anak dengan baik. Mereka harus memiliki kesadaran, anak-anak harus tahu manfaatnya untuk ke depan. Maka perlu adanya dukungan sarpras; perlu adanya dukungan teknologi; harus kita dukung penuh dengan proses belajar-mengajar. Agar mutu pendidikan semakin merata di Sleman.

Rasionalisasi benar-benar berimbang benar berhubungan dengan BOSDA. Anggaran yang namanya anggaran mandatory, semua OPD dipotong Rp 60 Milyar.

Termasuk adanya pengurangan BOSADA dari Rp 555.000 menjadi 338.500. Angka ini mengalami penurunan signifikan.

Arif: Untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman, sebaiknya bagi sekolah yang berprestasi akan kita beri bonus. Tapi jangan dikasih ke SMP Negeri 4 Pakem selalu, bisa disebar ke sekolah-sekolah lainnya. Dikasih bonus TV. Dianggarkan dulu agar ada kegiatan sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran.

Harga per unitnya sekitar Rp 26-30 juta anggran dari pusat. Yang Sleman itu harganya sampai Rp 200 juta per buah. Ada juga yang Rp 75 juta harganya. Modelnya yang diundang, sudah dilakukan sosialisasi dan internalisasi.

APBD Sleman itu hanya Rp 3,2 Triliun. Kalau 20 persen itu murni, maka kita sudah mencapainya untuk anggaran pendidikan. Dinas Pendidikan Sleman diberikan alokasi anggaran sekitar Rp 900 juta untuk mendukung program Pendidikan di Sleman. Semuanya harus ditata dan diatur dengan baik. Proyeksinya, ke depan Sleman bisa merealisasikan 20 persen dari APBD untuk Pendidikan, di luar gaji pegawai dan biaya pengembangan SDM. Namun jika hal itu dilakukan saat ini, bisa-bisa tidak bisa jalan semua program di Dinas lainnya. Sebab semuanya harus berbagi.

Litha: Saat ini masih terbatas karena anggaran 60 persen dari pusat; meski Pendapatan Asli Daerah Sleman memang naik; belum juga untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesehatan. Ketika anggaran naik. Guru juga kompetensinya juga akan menjadi lebih baik.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan bagi mereka mengikuti PPG. Penting untuk melakukan revitaliasi pendidikan, baiknya kita punya data prioritas agar ada data daerah yang tersambung pada data di pusat. Program

revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi, dapat dilakukan dengan daerah harus menyampaikan surat ke pusat; sehingga terjadi sinkronisasi data dapodik-nya.

Adapun masalah darurat yang dihadapi Sleman dalam bidang Pendidikan yaitu:

- Kompetensi guru yang harus dijaga dengan baik; terkait pendidikan inklusi, mudah disebut; tapi implementasinya sulit sekali. Kalau anak yang IQ yang rendah dicampur dengan anak yang standar; pasti akan merugikan siswa lain; gurunya secara kesiapan mental juga kurang siap.
- Pemahaman orangtua harus dibuka kembali. Maka memang perlu adanya guru pendamping khusus, untuk mendukung program sekolah inklusi. Sayangnya Sleman tidak punya guru pendamping khusus tersebut.
- Masalah pendidikan inklusi pelik, masalahnya berhubungan dengan gurunya, sarpras, dan lain sebagainya.
- Perlunya adanya peningkatan pendidikan inklusi, perlu adanya Unit Layanan Disabilitas.
- Perlu adanya peningkatan tri pusat pendidikan; yang penting tidak mengganggu; perlu adanya dukungan dari luar sekolah juga terutama partisipasi dari masyarakat.
- Solusinya, agar ada Unit Layanan Disabilitas.
- Kalau perlu di sekolah ada CCTV yang terkoneksi ke Disdik. Perlu juga penguatan peran masyarakat.
- Kalau dari sisi guru, perlu dijaga kompetensinya guru.
- Penambahan P3K paruh waktu perlu dilihat Kembali efektivitasnya, sebab hal tersebut sangat membebani APBD. Penyebab adanya refocusing/rasionalisasi anggaran di Sleman disebabkan adanya kebijakan P3K Paruh Waktu dan MBG.

Arif: adanya refocusing, sebenarnya adalah adanya penghematan anggaran untuk kegiatan yang banyak seremonialnya. Lebih pada kepada yang aplikatif. Kami menyikapi hal tersebut. DPRD Sleman meyakini pada akhir tahun akan ada Rp 200 milyar yang bisa dikembalikan dan diakses Kembali sebagai efek dari penghematan tersebut.

Dwi: solusi mengintegrasikan dengan mata pelajaran informatika; yang bisa mengajarkan dengan baik. Mengadakan bimtek, langkanya.

Ponidi: Kita memang sampai hari ini hampir; guru sudah penuh mengajar; berhubungan dengan sarpras; sudah memberikan sarpras. Tapi itukan giliran. Padahal bicara soal teknologi itu terikat oleh waktu. Di mana teknologi saat ini modern, namun bisa 10 tahun lagi, teknologi tersebut sudah usang. SMP Negeri 4 Pakem sudah melakukannya.

Soal sarpras juga menjadi kendala. Solusinya, Kerjasama dengan universitas IT, untuk itu. Agar mahasiswa bisa mengajar soal IT.

Ada MKKS dan K3S, MGMP, dan MGBK, agar ada kegiatan peningkatan mutu kompetensi kepala sekolah,

Kita ingin melanjutkan program Kepala Dinas Pendidikan Sebelumnya (Pak Ery Widaryana), di mana ada lomba best practice akan berupaya; ada apresiasi. Ada fenomena unik bahwa jabatan Kepala Sekolah tidak diminati para guru. Sehingga banyak jabatan Kepala Sekolah di Sleman yang masih kosong. Kita pernah belajar ke Wonosobo, pulang kita implementasikan misalnya soal; KIPP tingkat DIY; sudah bisa ikut untuk menutup itu. Pada bulan Mei agar bisa meningkatkan indeks inovasi.

SMP Negeri 3 Godean dan SMP N Kalasan bekerjasama dengan Google. Kami sudah mendorong dan memotivasi agar para guru siap menjadi kepala sekolah. Makanya Kepala Sekolah harus diapresiasi agar dapat termotivasi.

Mustadi: Fenomenanya saat ini masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri minatnya turun tiap tahun, terutama pada tingkat SD. Masyarakat sekarang berhak memilih untuk sekolah di mana sesuai pandangannya. Pada satu sisi, sekolah negeri banyak yang tak dapat murid baru; pada aspek lain; ada sekolah swasta yang berdiri. Artinya bahwa masalah tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah. Bahwa ketika sekolah negeri akan menyelenggarakan kegiatan, ingin bersaing membutuhkan biaya dan anggaran. Sehingga bagaimana kita mendorong keterlibatan masyarakat mendorong orangtua atau wali murid ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kemajuan sekolah dengan melihat kondisi tersebut. Kita sudah mengajak juga ombudsmen DIY; agar peran komite sekolah bisa optimal. Bagaimana agar peran masyarakat bisa berjalan dengan baik, apa yang bisa dilakukan dan bisa diterima dengan baik. Penyelenggara di situ adalah bukan komite, tetapi adalah paguyuban orangtua murid. Itu solusi tengahnya.

Arif: SMP N 4 Pakem dibuat sebagai 1 pilot project bagi sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Sleman. Sebab sudah bermutu unggul. Kami akan hitung sesungguhnya untuk kebutuhan biaya pelajar sampai lulus itu berapa rupiah di sana. Kalau angkanya sudah diketahui dan ditetapkan sebagai standar pengelolaan keuangan daerah bidang pendidikan. Kalau tidak cukup untuk mem-back up biaya standar tersebut, maka besarnya BOSDA kita genjot untuk dinaikkan. Sehingga kualitasnya akan sama. Menyesuaikan ketentuan dengan kemampuan anggaran daerah. Tujuan utamanya yakni mengetahui dengan pasti jumlah kebutuhan 1 siswa dalam 1 tahun itu berapa biayanya. Ini perlu riset.

Seragamnya bahkan kalau bisa termasuk yang dibiayai, akan kita biayai kok; tapi belum bisa karena regulasinya tidak membolehkan hal tersebut. Namun masih cita-cita. Harapan kami, sekolah negeri ini yang bersifat gratis, benar-benar gratis. Saat ini yang terjadi adalah bisnis pendidikan. Akhirnya uangnya masuk ke modal, yang berani mendirikan sekolah. Padahal tujuan pendidikan, adalah memberikan layanan pendidikan. Dulu ada retribusi pendidikan, tapi sekarang tidak ada lagi. Undang-undangnya sudah tidak ada.

Ponidi: permohonan Disdik kepada DPRD Sleman. Sekolah-sekolah negeri bergerak sedikit saja sudah disempit, harapannya bagaimana supaya bisa memberikan kontribusi optimal. Biar semua pihak dapat berpartisipasi, agar berkomunikasi langsung ke Disdik atau ke sekolah.

Dwi: Peningkatan pelayanan mutu Pendidikan agar kompetensi guru itu menjadi penting. Misalnya ditugaskan sebagai apapun harus bisa dan siap.

Litha: Agar bisa meningkatkan potensi daerah, secara teknologi sekolah-sekolah swasta lebih maju. Hal tersebut menjadi tantangan bersama Kabupaten Sleman. Dari berbagai hal yang menjadi kendala, semoga ke depan bisa dicarikan solusi Bersama.

Ringkasan notulensi FGD grup lainnya (kepala sekolah, guru, dan pengawas, serta komite sekolah) terlampir.

Hasil FGD Kepala Sekolah SMP dan SD

Pertanyaan 1

1. Memperkuat pola pikir *growth mindset*, dengan berbagai pelatihan dan mengklarifikasi kepada siswa setelah pembelajaran melalui google form
2. Memaksimalkan kemitraan baik Kepala Sekolah maupun guru untuk pembinaan dan pembekalan guru dan kepala sekolah dalam implementasi *deep learning*.
3. Menyusun RKT, membuat APBS, mendorong guru melalui ruang guru GTK,
4. Memfasilitasi internet guru, memberikan fasilitas pendanaan, memenuhi kebutuhan buku

5. Memaksimalkan bimtek deep learning melalui pendanaan bos kinerja (yang tidak mendapat bos kinerja tidak mengikuti bimtek)
6. Membangun budaya sekolah kolaboratif
7. Memberikan apresiasi bagi guru yang berprestasi

Pertanyaan 2

1. Mengkorelasikan efektifitas kepemimpinan, kualitas guru dan peran orang tua. Permasalahan bagaimana membuat panduan kepemimpinan berkualitas.
2. Ruh pelaku kurikulum adalah guru, maka kepala Sekolah harus mampu meningkatkan kompetensi guru.
3. Peningkatan kompetensi melalui berbagai diklat

Pertanyaan 3

1. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler
2. Mengadakan festival kebudayaan, lomba cerdas cermat, siswa membuat program peningkatan mutu.
3. Program disosialisasikan ke siswa dan orang tua, termasuk fasilitas pendanaan
4. Melakukan audisi dalam pemilihan bakat dan minat.
5. Mengadakan les
6. Strategi peningkatan mutu, memberikan kesempatan kepada siswa seluas-luasnya bagi siswa yang akan mengembangkan talentanya termasuk memberikan fasilitas bagi siswa baik yang di sekolah maupun diluar sekolah. Membuat istilah-istilah yang menarik. (sempat terjadi mis komunikasi).
7. Menanamkan kepercayaan antar anggota stake holders

Pertanyaan 4

1. Menggunakan strategi keteladanan jika gagal menggunakan instrument yang sedikit ekstrim
2. Memberikan apresiasi kepada guru berprestasi
3. Pembiasaan doa Bersama
4. Pembekalan dan motivasi dengan nara sumber dari eksternal
5. Tertib administrasi,

Pertanyaan 5

1. Sekolah selalu dituntut berbagai mutu padahal mutu itu terbentuk tidak hanya di sekolah, peran lingkungan keluarga lingkungan bermain sangat berpengaruh.
2. Kepedulian masyarakat terhadap perilaku anak sangat rendah.
3. Beban kepala sekolah sangat berat karena tekanan masyarakat, karena mentertibkan siswa
4. Masalah kekurangan guru, dinas tidak mau membayar guru honorer
5. Membatasi akses internet untuk di kabupaten sleman terhadap situs judol dan pornografi dan pornoaksi

Pertanyaan 6

1. Parenting
2. Melakukan pertemuan dengan orang tua secara periodic, melaporkan hasil belajar siswa yang baik maupun yang kurang baik
3. Pembatasan penggunaan sepeda motor oleh siswa dan sosial media
4. Efektifitas guru wali dan pemanfaatan jurnal oleh orang tua
5. Membuat program literasi baca tulis, dan diberikan apresiasi dan diapload dalam sosial media kerja sama dengan Lembaga yang bergerak dibidang literasi

Pertanyaan 7

1. Pemahaman deep learning belum maksimal karena masih banyak yang belum mendapat pelatihan

Pertanyaan 8

1. Mengupayakan mendapat dapodik/NUPTK

Pertanyaan 9

1. Mendapat TPP
2. Terpenuhi kebutuhan guru sesuai kompetensinya
3. Sekolah swasta guru yang pindah bisa Kembali ke sekolah asal
4. Menambah kuota fasilitasi
5. Ketepatan pencairan tpg
6. Keterlambatan kenaikan pangkat/jabatan
7. Mediasi guru dan orang tua
8. Regruping SD
9. Mengawal BOSDA tidak diturunkan terkait efisiensi
10. Mendukung kepala sekolah menjadi jabatan yang menarik
11. SPMB nilai raport perlu ditinjau
12. Bantuan suka rela yang aman
13. Pemenuhan kekurangan guru dana bos tidak cukup untuk membayara guru
14. Kegiatan siswa diluar sekolah dan efektifitas Pendidikan di Masyarakat sekolah dan keluarga
15. Perjuangan tunjangan kepala sekolah
16. Kepala Sekolah bisa mengangkat guru honor
17. Advokasi guru dan kepala sekolah
18. Apresiasi guru dan kepala sekolah
19. Penempatan P3K/Paruh Waktu sesuai sekolah asal
20. Permendikdasmen 11/2025 penambahan jam tidak diakui
21. 5 hari sekolah tetap
22. Tenaga administrasi di SD
23. Kinerja melalui laman kemendikbud
24. Kejelasan regruping
25. Peningkatan mutu kapasitas sekolah

1. **Bagaimana strategi yang dijalankan para kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) pada berbagai SD dan SMP se-Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Sleman.**

Nuril (Prambanan)

- Sekolah mengadakan uji public kurikulum. Komite sekolah melihat bahwa dengan adanya kurikulum deep learning menunjukkan bahwa guru harus terus mengikuti kebijakan yang terus berubah.
- Tantangan ada di bagaimana membuat guru paham.
- Belum melihat strategi implementasi yang spesifik kecuali lewat project-project kecil di sekolah.

Pujo (Moyudan)

- Menurut Komite Sekolah, guru sudah bagus.
- Di SMP Kaliduren sudah ada review kurikulum juga.

Juno (Gamping)

- Terkait penyelenggaraan kurikulum, Kepala Sekolah harus menjadi inspirator dalam penyelenggaraan kurikulum.
- Kurikulum baru harus tetap mengikuti kebutuhan lokal terkait kebudayaan.

Suryati (Berbah)

- Kurikulum sudah berjalan dan sudah ada studi tiru.

Bambang (Kalasan)

- Kebijakan terkait kurikulum harus diikuti dengan pendanaan.

Faruk (Cangkringan)

- Adanya kurikulum baru dimanfaatkan sekolah untuk membuat kekhasan.
- Pengoptimalan peran wali siswa.
- Harus ada konsep parenting school sebagai media sosialisasi dan memperkuat pengawasan oleh wali siswa.
- Harus meningkatkan adab siswa

2. Bagaimana efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, peran orang tua, serta peran implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman?

Faruk (Cangkringan)

- Setiap guru berperan sebagai manajer dan diberi tanggung jawab mendalami kurikulum sesuai bidang masing-masing.
- Harus ada komunikasi dengan orang tua.
- Ada pendampingan khusus ke siswa, baik di bidang akademik/nonakademik, sesuai hasil pemetaan sebelumnya.

Bambang (Kalasan)

- Peran Kepala Sekolah penting.

3. Berhubungan dengan masalah dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sleman, sebutkan dan jelaskanlah masalah utama atau darurat (minimal 3 buah) apa sajakah yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Sleman sekarang. (Sudah mencakup jawaban pertanyaan nomor 4 terkait solusi)

Juno (Gamping)

- Perlu ada pemerataan guru atau guru bantu. **Solusi yang ditawarkan bisa dengan membuat perjanjian dengan universitas.**
- Sekolah negeri kalah saing dengan sekolah swasta.

Suryati (Berbah)

- Kekurangan guru dan pihak sekolah takut menarik dana bantuan untuk menggaji guru.

Bambang (Kalasan)

- Masalah alokasi BOSDA jika bisa ditingkatkan.

Mudi (Tempel)

- Masalah transportasi agar anak tidak menggunakan sepeda motor. **Solusinya ada kerja sama antara sekolah dengan kepolisian.**

- Etika siswa yang menurun seperti cuek pada guru. **Solusi yang ditawarkan adalah memperkuat pembelajaran nilai lokal (Pendidikan Khas Kejojgaan/PKJ) dan edukasi guru.**

Nuril (Prambanan)

- Sekolah takut meminta iuran untuk mendanai kegiatan kreatif. **Solusinya adalah dengan memainkan bahasa peraturan atau diksi. Misalnya bukan iuran tapi sumbangan sukarela dengan nominal yang berbeda-beda.**
- Peserta lain menambahkan bahwa di sekolahnya mekanisme penarikan sumbangan sukarela diadakan setelah ada komunikasi dengan paguyuban kelas dan penarikan sumbangan diadakan oleh dan atas nama paguyuban kelas.

4. Sudah pahamkah para orang tua mengenai substansi dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam, jelaskan.

Responden sepakat menjawab bahwa baru sedikit orang tua yang paham.

5. Bagaimanakah kontribusi peran orang tua dalam kesuksesan melaksanakan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam?

Suryati (Berbah)

- Orang tua berperan menyiapkan anak, termasuk dari sisi psikologis.

Mudi (Tempel)

- Sebagian orang tua cuek dan sepenuhnya menyerahkan masalah pendidikan ke sekolah.
- Orang tua berperan dalam pendanaan agar sekolah bisa mengadakan acara-acara kreatif.

6. Berikan kritik, masukan, pendapat/ide/gagasan, dan ataupun saran/rekomendasi yang bisa diberikan untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Kabupaten Sleman sekarang dan ke depan?

Mudi (Tempel)

- UPT Kecamatan diberi anggaran khusus untuk mengundang komite sekolah supaya pertemuan komite bisa berjalan rutin.
- Kalau bisa semua komite sekolah masuk Forum Komunikasi dan lebih terorganisir.
- Dewan Pendidikan dimohon membuat masukan atau aturan terkait komite sekolah.
- PLT Kepala Sekolah jangan terlalu lama menjabat karena PLT tidak bisa mengambil kebijakan. Maksimal 3 bulan.

Pujo (Moyudan)

- Pembiayaan acara komite sekolah supaya komite sekolah tidak perlu keluar uang sendiri.

Nuril (Prambanan)

- Peningkatan mutu pendidikan tidak boleh lepas dari konteks pemerataan.
- Harus dipastikan regulasi sudah terpadu.
- Harus ada pendekatan dengan nilai lokal terhadap kurikulum baru.
- Kepala Sekolah harus memahami regulasi.
- Perkuat pendidikan karakter terutama di SD.

Suryati (Berbah)

- Adakan pelatihan bagi guru.

Juno (Gamping)

- FGD perlu lebih sering lagi.

- Pendidikan harus menjadi kesadaran bersama.
- Harus ada komunikasi dan fasilitasi.
- Bidang SD dan SMP jangan dicampur. Termasuk pemisahan Forum Komite Sekolah SD dan SMP.
- Ada sistem koordinator per kapanewon pada Dewan Pendidikan.

Bambang (Kalasan)

- Anggaran BOSDA dinaikkan.
- Kompetisi guru ditingkatkan dengan event-event kreatif.
- Pengisian kepala sekolah jangan asal-asalan.
- Buat aturan yang sama antara sekolah negeri dan swasta.
- Pembangunan fisik sekolah mohon libatkan komite sekolah karena komite sekolah lebih paham.
- Sosialisasi peraturan yang jelas ke kepala sekolah sehingga kepala sekolah paham dan tidak takut melakukan terobosan.
- Adanya pendampingan hukum apabila terkait masalah yang berasal dari kurang pemahannya kepala sekolah terhadap kebijakan.
- PEMDA mohon membuat terobosan regulasi agar lebih fleksibel dan tidak menyulitkan.

Faruk (Cangkringan)

- Lelang tender lebih terbuka dan obrolkan rencana pembangunan dengan komite sekolah.
- Akses pengajuan guru honorer lebih terbuka.
- Naikkan gaji guru dan tenaga honorer.

BAHAN FGD RISET DEWANDIK SLEMAN:STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SECARA KOMPREHENSIF DI KABUPATEN SLEMAN

Per 19 November 2025

Daftar Pertanyaan untuk Para Pengawas (Koordinator: Sutarta//Marietta D. Susilawati)

1. Bagaimana strategi dalam pengimplementasian kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) pada berbagai SD dan SMP se-Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Sleman?

Jawab:

- a. Bimtek bagi sekolah yang mendapatkan BOSKIN
 - b. Pengimbasan dari sekolah yang mendapatkan BOSKIN kepada sekolah sasaran
 - c. IHT PM bagi sekolah yang tidak mendapatkan BOSKIN, yang diadakan oleh APSI sebanyak 800 peserta (Pengawas, Kepala sekolah guru semua jenjang) bertempat di Kemenag dan di SMAN 1 Godean
 - d. Pendampingan sekolah oleh pengawas, untuk jenjang SMP diperkirakan 80% sudah mendalami materi
 - e. Bimtek yang diselenggarakan BBGTK, pengawas SD 3 orang, SMP 3, TK 3 orang
2. Bagaimana efektivitas kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, peran orangtua, serta peran implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman?

Jawab :

- a. Kompetensi guru : pembelajaran masih penyesuaian yang baru
 - b. Kepala Sekolah : masih penyesuaian dengan peraturan yang baru
 - c. Peran orang tua : belum maksimal mendukung pembelajaran mendalam
3. Peran pengawas sangat penting dalam mendukung terwujudnya kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman yang semakin baik. Namun jumlah pengawas sekolah di Kabupaten Sleman terbatas. Bagaimanakah strategi yang dijalankan oleh para pengawas sekolah yang jumlahnya terbatas (minimalis) dalam menjalankan ketugasan pokoknya. Padahal ada ribuan lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman yang harus diawasi?

Jawab:

- a. SMP : Kepala sekolah dikumpulkan dan pendampingan ke sekolah, supervisi di sekolah, monitoring implementasi Pembelajaran, memastikan keterlaksanaan PM, dan penyusunan instrumen supervisi dan monitoring pelaksanaan PM.
 - b. SD : Pendampingan ke satuan pendidikan dan komunitas belajar (guru dan KS), monitoring dan supervisi
4. Berdasarkan pengalaman panjang Bapak/Ibu sebagai pengawas sekolah selama ini, sebutkan dan jelaskanlah masalah utama/darurat (minimal 3 buah) apa sajakah yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Sleman? Mengapa juga masalah tersebut bisa muncul dan bagaimanakah juga tawaran solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut!

Jawab :

- a. Penerapan pelaksanaan PM
 - b. Perencanaan pembelajaran guru
 - c. Pengadministrasian asesmen sampai penilaian rapor
 - d. Masih ditemui bullying di sekolah
5. Berdasarkan hasil monitoring dan pengawasan Bapak/Ibu pengawas sekolah, bagaimana strategi/cara efektif untuk meningkatkan mutu layanan dan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman ke depan?

Jawab:

- a. Pendampingan secara intensif, monitoring kepada kepala sekolah dan guru
 - b. Optimalisasi kornel, baik intra sekolah maupun lintas sekolah
 - c. Berbagi praktik baik kepala sekolah dan guru
 - d. Mendorong kepala sekolah dan guru untuk mengikuti kegiatan Apresiasi GTK
 - e. Mendorong kepala sekolah dan guru belajar pada Platform Ruang GTK
6. Bagaimanakah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memperhatikan masalah peningkatan profesionalitas dan karir para pengawas sekolah di Kabupaten Sleman?

Jawab :

- a. Belum ada kegiatan peningkatan kapasitas pengawas dari Dinas Pendidikan
 - b. Apresiasi pengawas masih kurang, perlu ada TPP bagi pengawas
 - c. Kenaikan pangkat ke jabatan Ahli Utama belum anjeb
 - d. Pengelolaan kinerja masih terkendala
7. Pernahkah punya pengalaman selama menjalankan tugas kepengawasan sekolah mengalami ancaman, intimidasi, gangguan atau bentuk intervensi lainnya yang dapat mengganggu profesionalitas dalam menjalankan tugasannya?

Jawab : Tidak ada

8. Sudah fahamkah para pengawas mengenai substansi dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam? Jelaskan!

Jawab :

- a. Sudah, tetapi masih perlu peningkatan dan penguatan
9. Berhubungan dengan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam, sudah sejauh mana berdasarkan hasil pengamatan dan pengawasan para pengawas terkait model kebijakan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam dapat berpotensi meningkatkan mutu pendidikan di Sleman?

Jawab : Karena baru proses belum terlihat peningkatan mutu

10. Jumlah guru SD dan SMP yang sudah tersertifikasi pendidik saat ini ada 5.433 orang dan yang belum tersertifikasi sebanyak 6.341 orang (Satu Data Pendidikan Kabupaten Sleman, 2025). Upaya apa yang sudah dan akan dilakukan kepala sekolah untuk mendorong agar para guru yang belum/tidak tersertifikasi ini bisa tersertifikasi menjadi guru profesional?

Jawab :

- a. Mendorong mengikuti PPG Daljab bagi yang sudah masuk Dapodik
- b. Medorong mengikuti PPG Prajab bagi yang belum masuk Dapodik

11. Berikan kritik, masukan, pendapat/ide/gagasan, dan ataupun saran/rekomendasi yang bisa diberikan untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Kabupaten Sleman sekarang dan ke depan?

Jawab:

- a. Pemenuhan sarpras di sekolah sesuai dengan kebutuhan murid
- b. Peningkatan profesionalisme dan karir guru, kepala sekolah dan pengawas
- c. Memenuhi kebutuhan guru kelas maupun guru mata pelajaran
- d. Penambahan jumlah pengawas
- e. Perlu adanya tambahan kesejahteraan dari daerah bagi pengawas

Bahan Diskusi FGD Dewandik
Peserta : Guru, Himpaudi, IGTKI-PGRI

1. Bagaimana strategi yang dijalankan para kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) pada berbagai SD dan SMP se-Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Sleman?
2. Bagaimana efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, peran orangtua, serta peran implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman?
3. Berhubungan dengan masalah dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sleman, sebutkan dan jelaskanlah masalah utama/darurat (minimal 3 buah) apa sajakah yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Sleman sekarang?
4. Berikan solusi cerdas yang akan ditawarkan dan atau sudah dilakukan untuk mengatasi berbagai problematikan di atas?
5. Jumlah guru SD dan SMP yang sudah tersertifikasi pendidik saat ini ada 5.433 orang dan yang belum tersertifikasi sebanyak 6.341 orang (Satu Data Pendidikan Kabupaten Sleman, 2025). Bagaimanakah langkah konkrit yang bisa ditempuh agar para guru yang belum/tidak tersertifikasi tersebut bisa tersertifikasi menjadi guru profesional?
6. Sudah fahamkah para guru mengenai substansi dari kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam? Jelaskan!
7. Bagaimanakah kendala dan hambatan yang dialami para guru dalam mengimplementasikan kurikulum dengan pendekatan mendalam?
8. Bagaimanakah solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah kendala dan hambatan tersebut?
9. Bagaimanakah upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk meningkatkan profesionalitas para guru TK-SD-SMP se-Kabupaten Sleman saat ini?
10. Bagaimanakah upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kesejahteraan para guru TK-SD-SMP se-Kabupaten Sleman saat ini?
11. Sudah efektifkah model evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja guru?
12. Berikan kritik, masukan, pendapat/ide/gagasan, dan ataupun saran/rekomendasi yang bisa diberikan untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Kabupaten Sleman sekarang dan ke depan?

Kebijakan Positif KS

Guru 1 SD

KS mengirim guru untuk mengikuti bimtek, lalu mengimbaskan, kebijakan belum terlihat

Guru 1 martiyem igkti

Kebijakan KS thp DL di Sleman di TK yang mendapat pelatihan belum semua, guru dikirim mengikuti pelatihan secara sukarela/mandiri. Di KKG saling membantu dengan pengimbasan yang sudah dapat pelatihan DL.

Risna SD di Prambanan

Rabu ada rabu produktif, semua guru dibiayai untuk pelatihan DL.

Kebijakan mendukung guru untuk menerima hal baru

SMP 1 Mlati

Menanggapi DL masih kesulitan karena masih bersifat masih umum terutama dalam DPL. Penjelasan rinci terkait DPL cara memilih sesuai mapelnya karena masih kesulitan. Butuh petunjuk konkrit untuk memilih DPL sesuai mapelnya.

Sutrisno kap Gamping

Semua KS bijak, yang jadi masalah yang mendapat pelatihan baru sebagian kecil dan tdk menguasai semua, sehingga jika dipaksakan untuk mengimbaskan maka hasilnya tidak maksimal. Semua jadi ngambang goalnya tidak jelas. Pengimbasan belum merata dan pengimbas belum menguasai materi DL. Yang dibimtek bukan hanya yang mendapat boskin sj.

Efektivitas kepemimpinan KS

- Pemerataan penguatan DL

Guru

Pelatihan belum intensif dan tidak menerima boskin, sekolah melaksanakan kombel. Guru belajar secara mandiri, guru menjadi tidak greget, tidak menemukan perbedaan dengan pembelajaran sebelumnya. Perlu ada pengawasan.

Waktu untuk memahami

Guru menyesuaikan dengan kurikulum, belajar secara online.

Sutrisno: tergantung pemahaman guru masing-masing. Guru sudah melaksanakan tapi tidak memahami bahwa guru sudah melaksanakan PM itu.

Seberapa paham PM

80%

Guru membutuhkan kemampuan analisis dan validasi apa yang sudah dilakukan.

Mengubah mindset adalah yang paling lama dan sulit.

PM itu menilai proses jadi anak diluruskan hanya saat melakukan kesalahan.

Kendala

- Mindset
- Pemahaman PM

IGTK

- Di PAUD mudah dilakukan, realisasi guru mengimplementasikan belum paham. Peran guru untuk mendalami dan menerima penjelasan itu penting, diharapkan ada pelatihan PM berkelanjutan. Peran orang tua juga menjadi masalah tersendiri, dimana ortu banyak tuntutan dimana calistung menjadi prioritas utama.

Usulan guru

- orang tua terlibat dalam PM
- Hidayat SD depok 1

Sekolah punya tema yang berbeda-beda setiap tahun sbg inovasi untuk menarik murid banyak dalam PPDB. Kelas 1-6 terlibat langsung dalam proyek sesuai tema hingga tuntas. Sekolah menggunakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar PM.

Masalah Pendidikan yang darurat

- Anak SD tahun ke 3 tidak mau sekolah tinggal di kelas 1 terus, sehingga putus sekolah. Masalah anak putus sekolah. Negara mengambil hak asuh anak bisa atau tidak.

- Penerimaan siswa baru SMP, siswa ABK masuk lewat zonasi. Ketika anak sekolah tidak bisa mengikuti, di tengah jalan keluar, krn tdk bisa mengikuti. Tidak ada keterangan bahwa anak tsb ABK. (rekomendasi status anak normal/ABK).
- TKA. Komposisi belum tahu seperti apa. Standar nilai raport. Swasta cenderung mengunggulkan nilai karena sudah membayar mahal.
- Pendidikan karakter. Dalam PM ada 8 DPL. Dilema hasil akademik dengan karakter. Bullying verbal masih cukup tinggi, korbannya terkadang ABK. Sekolah butuh sinergi dengan orang tua. Sekolah ada parenting dan jurnal harian untuk meminimalisir masalah karakter. (yeni)
- Bullying di sekolah. Yang terkadang karena keluarga broken.
- Penggunaan gadget. Pengawasan gadget melalui kebijakan daerah.
- Perlindungan guru agar tidak mudah untuk dilaporkan oleh orang tua supaya ada alur dari daerah, karena selama ini masih inisiatif sekolah.

Permasalahan dari sisi guru

- Apakah ada yang mengadvokasi guru jika ada masalah di lapangan karena posisi guru saat ini yang bisa dikatakan lemah, karena orang tua yang mudah lapor.
- SD tidak ada TU. Sehingga guru dobel job. Pemerataan tugas guru, yang ditugaskan hanya guru-guru itu saja. Butuh bimtek yang berkelanjutan sesuai fase.
- Yuni Guru paud NF.

Anak PAUD tidak terlayani karena krisis guru PAUD karena guru banyak pindah ke formal. Sehingga butuh perhatian penuh untuk guru paud NF karena banyak yang masih terima kurang dari 100ribu perbulan.

Solusi

- Pemerataan terkait PM
- Bimtek berkelanjutan
- Pemda menganggarkan untuk guru agama untuk PPG (guru dibawah kemenag) ke depan tidak terjadi lagi.
- Bosda memfasilitasi guru non PNS
- Adanya kesetaraan untuk NF seperti formal, mendorong dewandik untuk meningkatkan tunjangan fasilitasi seperti yang formal (jumlah fasilitasi yang diterima sama seperti formal), kesetaraan secara perundang-undangan, serta kebijakan terkait TMT (pemutihan TMT bagi guru yang NF pindah ke formal)
- Ada instrumen menyeluruh ttg penilaian khusus untuk karakter anak. Dewandik di dorong utk membentuk tim guru penyusun instrumen penilaian agar memiliki target yang dibidik. (regulasi instrumen penilaian pendikar)
- Sistem pendidikan supaya tidak berubah-ubah, ada transisi untuk guru dalam kebijakan kurikulum jika terjadi pergantian pemangku kebijakan supaya siap dalam implementasi.

Sleman, 19 November 2025

Notulis,


SUPADIYANTO

Lampiran: Foto Kegiatan FGD

















Angket Guru

Petunjuk: Bacalah setiap pernyataan berikut dengan seksama. Beri tanda (✓) pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda. Skala penilaian menggunakan: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.

Identitas Responden (Guru)

Nama	
Jenis Kelamin	
Usia	
Sekolah/Instansi	
Jabatan/Peran	
Lama Mengajar/Mendampingi	

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	R (3)	S (4)	SS (5)
1	RPP/ATP saya memuat tujuan pembelajaran tingkat berpikir tinggi (HOT).					
2	Saya rutin menggunakan model PBL/inkuiri/proyek dalam pembelajaran.					
3	Penilaian saya lebih menekankan pada hafalan dibandingkan penerapan konsep.					
4	Saya menggunakan rubrik penilaian autentik (portofolio/kinerja).					
5	Saya melakukan asesmen formatif					

	untuk menyesuaikan strategi mengajar.					
6	Saya memfasilitasi kolaborasi dan diskusi antarsiswa.					
7	Saya memberi diferensiasi tugas sesuai kebutuhan belajar siswa.					
8	Saya kesulitan mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam mata pelajaran.					
9	Saya mengintegrasikan teknologi/AI untuk mendukung pembelajaran bermakna.					
10	Saya mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi secara berkala.					
11	Saya berkolaborasi dengan orang tua terkait perkembangan belajar siswa.					
12	Refleksi mengajar rutin saya lakukan untuk peningkatan mutu.					

Angket Kepala Sekolah

Petunjuk sama dengan Angket Guru.

Identitas Responden (Kepala Sekolah)

Nama	
Jenis Kelamin	
Usia	
Sekolah/Instansi	
Jabatan/Peran	
Lama Mengajar/Mendampingi	

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	R (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya memastikan visi-misi sekolah diturunkan ke target mutu terukur.					
2	Supervisi akademik saya berdampak pada perbaikan pembelajaran guru.					
3	Keputusan pengelolaan sarpras dilakukan tanpa melibatkan warga sekolah.					
4	Sekolah memiliki program pengembangan profesional guru yang berkelanjutan.					
5	Hasil evaluasi pembelajaran dimanfaatkan untuk merancang intervensi pembelajaran/remedial.					

6	Saya mendorong pembelajaran berbasis proyek dan masalah nyata.					
7	Budaya refleksi dan berbagi praktik baik sudah berjalan di sekolah.					
8	Kemitraan dengan orang tua/komite sekolah belum berjalan optimal.					
9	Sekolah memiliki SOP pencegahan perundungan dan penanganan kasus.					
10	Penggunaan anggaran berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.					
11	Monitoring iklim belajar (disiplin, keamanan, keteraturan) dilakukan rutin.					

Angket Orang Tua

Petunjuk sama dengan Angket Guru.

Identitas Responden (Orang Tua)

Nama	
Jenis Kelamin	
Usia	
Sekolah/Instansi	
Jabatan/Peran	
Lama Mengajar/Mendampingi	

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	R (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya mendampingi anak belajar di rumah secara rutin.					
2	Saya jarang berkomunikasi dengan wali kelas/guru terkait perkembangan anak.					
3	Saya menyediakan fasilitas dasar belajar (meja belajar, pencahayaan, buku).					
4	Saya mengawasi penggunaan gawai dan internet anak secara proporsional.					
5	Saya hadir dalam pertemuan orang tua/komite sekolah.					
6	Saya mendorong anak untuk berpikir					

	kritis dan memecahkan masalah sehari-hari.					
7	Saya terbuka bekerja sama dengan sekolah saat ada masalah belajar/perilaku.					
8	Saya mengetahui hasil evaluasi pembelajaran/asesmen anak dan menindaklanjutinya.					
9	Saya menyediakan waktu khusus untuk membaca bersama anak.					
10	Saya kesulitan membantu tugas sekolah anak.					

Kuisisioner bagi Pelajar

Identitas Responden (Pelajar/Siswa)

Nama	
Jenis Kelamin	
Usia	
Sekolah/Instansi	
Jabatan/Peran	

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	R (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya mengikuti pembelajaran dengan pendekatan kurikulum mendalam dengan menyenangkan di sekolah.					
2	Saya tidak mengalami kesulitan dan hambatan ketika para guru menjelaskan mata pelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam.					
3	Saya menilai para guru sangat antusias dalam mengajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam.					
4	Kelas terlihat lebih kondusif dan menyenangkan selama ini karena guru memberikan selingan humor yang menyenangkan di sela pelajaran.					

5	Saya sepakat jika para pelajar diberikan kesempatan untuk bertanya secara aktif di dalam kelas selama jam pelajaran.					
6	Guru tidak memberikan kesempatan kepada para murid untuk bertanya dan atau mengkritisi di dalam kelas.					
7	Kepala sekolah sangat aktif dalam memotivasi para siswa agar berprestasi.					
8	Orangtua atau wali murid penting keberadaannya untuk mendukung kelancaran para pelajar dalam belajar di kelas maupun di rumah.					
9	Fasilitas sekolah memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang mengasyikkan dan menyenangkan.					
10	Saya sudah memahami dengan baik prinsip pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning).					



Nomor: 10/DP-Slm/Rekom./XII/2025

Lamp. : 1 Eksemplar Cetakan Hasil Kajian/Riset Dewandik. Kab. Sleman Tahun 2025

Perihal : Penyampaian Surat Rekomendasi Dewandik Kab. Sleman ke Bupati Sleman

**Kepada: Yth. Bupati Sleman
Bapak H. Harda Kiswaya, S.E., M.Si.
di Kantor Bupati Sleman**

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam hormat,

Pertama, perkenalkanlah kami dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bupati Sleman yang sudah berkomitmen kuat dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman.

Kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bermaksud menyampaikan surat rekomendasi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman terkait **“Strategi Taktis dalam Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan secara Komprehensif di Kabupaten Sleman”** (terlampir). Hasil dari riset ini akan diekspos kepada publik baik secara langsung maupun melalui media massa.

Kami berharap besar agar sejumlah rekomendasi dalam riset tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bupati Sleman dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman pada tahun 2026.

Sebagai informasi tambahan, bahwa saat ini publik bisa mengetahui segala perkembangan serta menyampaikan aspirasi mengenai berbagai kebijakan dan kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman melalui situs/website: <https://dewandik.slemankab.go.id/> yang sudah dimiliki sejak Desember 2021 sampai sekarang.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Sleman, 10 Desember 2025

Hormat kami,

Ketua Dewan Pendidikan Kab. Sleman Sekretaris Dewan Pendidikan Kab. Sleman



Drs. ERY WIDARYANA, M.M.

SUPADIYANTO, S.Sos.I., M.I.Kom.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sleman
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
5. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi se-DIY
6. Tim Tenaga Ahli Bupati Sleman
7. Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman
8. Arsip/Dokumen